



LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH T.A 2025

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BOGOR

 Jl. Aman No.1, Tengah, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor
Jawa Barat 16914



TAHUN
2026

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

 [bpkad.kabbogor](https://www.instagram.com/bpkad.kabbogor)

 <https://bpkad.bogorkab.go.id>

 [BPKADKabupatenBogor](https://www.youtube.com/BPKADKabupatenBogor)

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029.

Mengacu pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka BPKAD menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi melalui Laporan Kinerja BPKAD Kabupaten Bogor ini pula diharapkan adanya optimalisasi dan efisiensi, efektivitas, dan peningkatan produktivitas kinerja pegawai dan pelayanan, sehingga secara keseluruhan mendukung perbaikan dan penyempurnaan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPKAD tahun berikutnya. Kepada semua pihak atas peran dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Cibinong, 27 Februari 2026

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor



W. R. Felitawan, S.H., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 196808122005011012

JABATAN	PARAF	TGL
SEKRETARIS		
SUBKOORDINATOR PROGRAM DAN PELAPORAN		

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	3
1.4 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi PD	5
1.5 Peta Proses Bisnis	6
1.6 Struktur Organisasi	7
1.7 Tugas dan Fungsi	10
1.8 Isu Strategis	13
1.9 Sumber Daya Manusia (SDM)	14
1.10 Keadaan Sarana dan Prasarana	17
1.11 Anggaran Tahun 2025	18
1.12 Tindaklanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2024	26
1.13 Sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	27
BAB II PERENCANAAN KINERJA	28
2.1 Rencana Strategis Tahun 2025-2029.....	28
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	39
2.3 Struktur Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2025	45
2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	51
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	53
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	53
3.1.1 Sasaran Strategis 1	55

a.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya	56
b.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun sebelumnya	56
c.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra	57
d.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Rata-Rata Nasional/Provinsi/Kabupaten	57
e.	Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi	58
f.	Rekomendasi Penyesuaian Target IKU Tahun 2025	60
g.	Capaian Kinerja dan Keuangan	60
3.1.2	Sasaran Strategis 2	65
a.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya	66
b.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun sebelumnya	66
c.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra	67
d.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Rata-Rata Nasional/Provinsi/Kabupaten	67
e.	Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi	68
f.	Rekomendasi Penyesuaian Target IKU Tahun 2025	69
g.	Capaian Kinerja dan Keuangan	70
3.2	Inovasi yang Mendukung Pencapaian Kinerja	72
3.3	Kolaborasi Lintas Sektor	74
3.4	Realisasi Anggaran	75
3.4.1	Realisasi Anggaran Menurut Sasaran BPKAD	75
3.4.2	Realisasi Anggaran Menurut Program BPKAD	75

3.4.3 Realisasi Anggaran Belanja BPKAD	76
3.5 Analisis Efisiensi	97
3.5.1 Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	97
3.4.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	98
BAB IV PENUTUP	128
4.1 Kesimpulan	128
4.2 Saran	130
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai BPKAD yang Menduduki Jabatan dan Pelaksana s.d Desember 2025.....	14
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan per Desember 2025	15
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan per Desember 2025	15
Tabel 1.4 Jumlah Pegawai BPKAD Berdasarkan Kesarjanaan/Disiplin Ilmu per Desember 2024.....	16
Tabel 1.5 Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor per Desember 2025.....	17
Tabel 1.6 Pendapatan Daerah BPKAD Tahun 2025	19
Tabel 1.7 Belanja Daerah BPKAD Tahun 2025	19
Tabel 1.8 Anggaran Perubahan Tahun 2025 per Program, Kegiatan dan Subkegiatan	20
Tabel 1.9 Anggaran Belanja per Sasaran Strategis	25
Tabel 1.10 Anggaran Belanja per Program Utama	25
Tabel 1.11 Tindaklanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2024.....	26
Tabel 2.1 Perumusan Indikator Tujuan BPKAD Tahun 2025 – 2029	30
Tabel 2.2 Indikator Sasaran BPKAD Berdasarkan Renstra 2025 – 2029	32
Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	33
Tabel 2.4 Perumusan Strategi BPKAD Kabupaten Bogor	36
Tabel 2.5 Strategi Pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2030 sesuai Tupoksi BPKAD.....	38
Tabel 2.6 Sasaran, Indikator, dan Target BPKAD Tahun 2025	39
Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	40
Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	41
Tabel 2.9 Realisasi Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	41
Tabel 3.1 Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progress Positif	53

Tabel 3.2 Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progress Negatif	53
Tabel 3.3 Realisasi IKU BPKAD Tahun 2025.....	54
Tabel 3.4 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangannya (Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas.....	61
Tabel 3.5 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangannya Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Berkualitas.....	70
Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Menurut Sasaran BPKAD	75
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Menurut Sasaran PROGRAM BPKAD	75
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Belanja BPKAD.....	76
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Pendapatan BPKAD	81
Tabel 3.10 Tabel Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2025	84
Tabel 3.11 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	81

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Cascading Kinerja BPKAD Kabupaten Bogor	5
Gambar 1.2 Peta Proses Bisnis BPKAD Kabupaten Bogor.....	7
Gambar 1.2 Struktur Organisasi	9
Gambar 1.3 Data Kepegawaian	17
Gambar 2.1 Penjabaran Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor berkaitan dengan Indikator Kinerja Utama BPKAD Tahun 2025	29
Gambar 2.2 Analisa Pohon Masalah	30
Gambar 2.3 Analisa Pohon Tujuan.....	31
Gambar 2.4 Analisa Ukuran Keberhasilan (Indikator)	31
Gambar 2.5 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	51
Gambar 2.6 Sistem Informasi Pemerintah Daerah	51
Gambar 2.7 Aplikasi ATISBADA	52
Gambar3.1 Capaian dan Realisasi Sasaran Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas.....	55
Gambar 3.2 Penyesuaian Target Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi.....	60
Gambar 3.3 Capaian 2025 Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi	63
Gambar 3.4 Rekomendasi Penyesuaian Target IKU Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi Tahun 2025	63
Gambar 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Rata-Rata Nasional/Provinsi	64
Gambar 3.6 Faktor Yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan Ketepatan Penetapan APBD.....	65
Gambar 3.7 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya	68
Gambar 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra	37
Gambar 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra	65
Gambar3.10 Faktor Yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi	68

Gambar 3.11	Penyesuaian Target Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi.....	73
Gambar 3.12	Capaian 2024 Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi.....	74
Gambar 3.13	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya	76
Gambar 3.14	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra	77
Gambar 3.15	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Rata-Rata Nasional/Provinsi/Kabupaten	77
Gambar 3.16	Faktor Yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi	79
Gambar 3.17	Rekomendasi Penyesuaian Target IKU Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi Tahun 2025.....	80

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2024 beserta Tindak Lanjut Hasil Evaluasi.
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Murni dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
3. Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024
4. SOP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor
5. Dokumen pelaksanaan optimalisasi kegiatan Pengelolaan keuangan yang terkait dengan IKU "Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi" berupa:
 - 5.1 Rapat RENSTRA 2025-2029
 - 5.2 Rapat RENJA Perubahan 2025
 - 5.3 Kegiatan Penyusunan Perjanjian Kinerja 2025
 - 5.4 Koordinasi terkait Evaluasi SAKIP BPKAD 2025
 - 5.5 Rapat Evaluasi Kinerja TW I, II, III, dan IV Tahun 2025
 - 5.6 Dokumen pelaksanaan optimalisasi kegiatan Ketepatan Penetapan APBD terkait sosialisasi kebijakan dengan contoh evidence berupa "Laporan Hasil Sosialisasi Permendagri Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2026" dan Penghargaan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset pada SKPD tahun 2025
6. Dokumen pelaksanaan optimalisasi kegiatan Pengelolaan keuangan yang terkait dengan IKU "Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi" berupa:
 - 6.1 Pelaksanaan Kegiatan Bimtek BMD Tahun 2025
 - 6.2 Pelaksanaan Kegiatan Rekonsiliasi Data BMD 2025
 - 6.3 Rework dan punishment pada kegiatan Pemeringkatan melalui Aplikasi Siperjaka
7. Aplikasi Teknologi Informasi Surat Pencairan Elektronik Digital Yakin Enggal Salur (SPEED YES) sebagai INOVASI yang mendukung pencapaian Kinerja.

LINK EVIDENCE GOOGLE DRIVE

<https://drive.google.com/drive/folders/1IH3KuCCpBQkccvqwsPX8G7M4gPD4ycCn>

RINGKASAN EKSEKUTIF

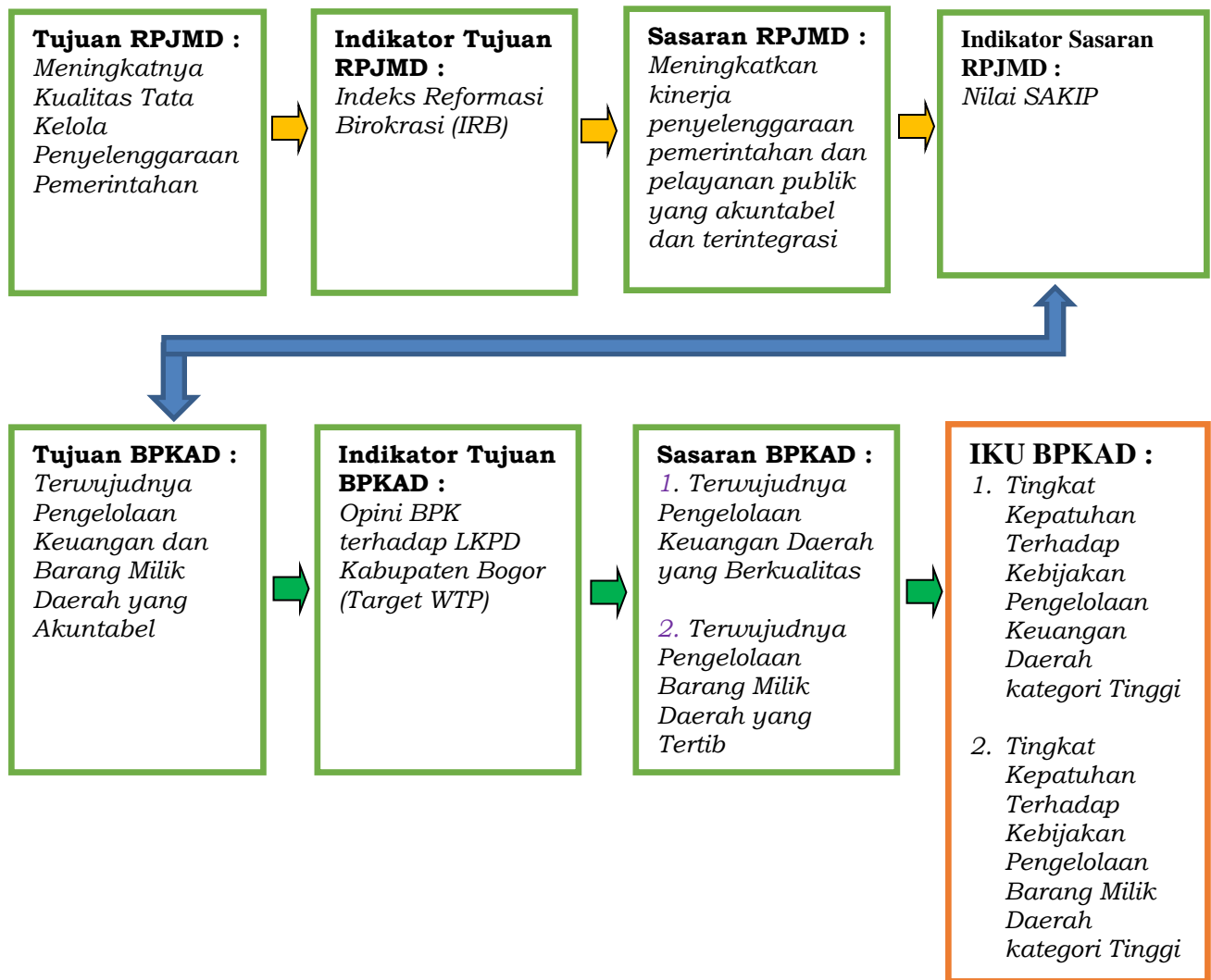
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis BPKAD Tahun 2025-2029. Penyusunan Laporan Kinerja BPKAD Tahun 2025 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2025.

Adapun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Visi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 yaitu "**Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang**". Adapun misi Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Baik;
2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju;
3. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Berkeadilan;
4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;
5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

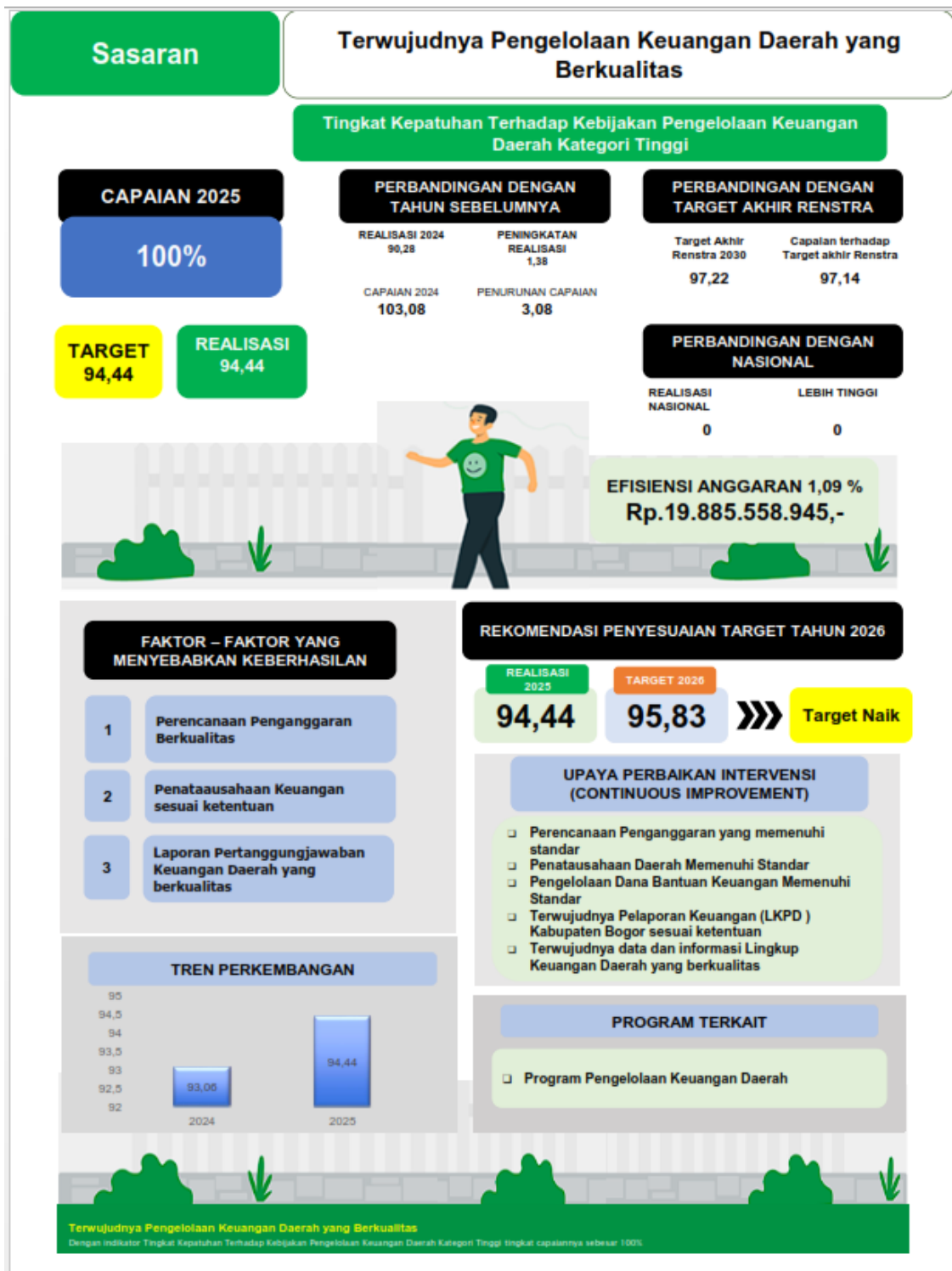
Berdasarkan misi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 yang berkaitan secara langsung dengan tupoksi BPKAD adalah misi ke 1 (satu) yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Baik". Adapun keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama BPKAD dapat disajikan pada bagan sebagai berikut:



Tujuan yang hendak dicapai BPKAD adalah *Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel*. Adapun sasaran BPKAD pada Tahun 2026 ada 2 (dua) sasaran yaitu :

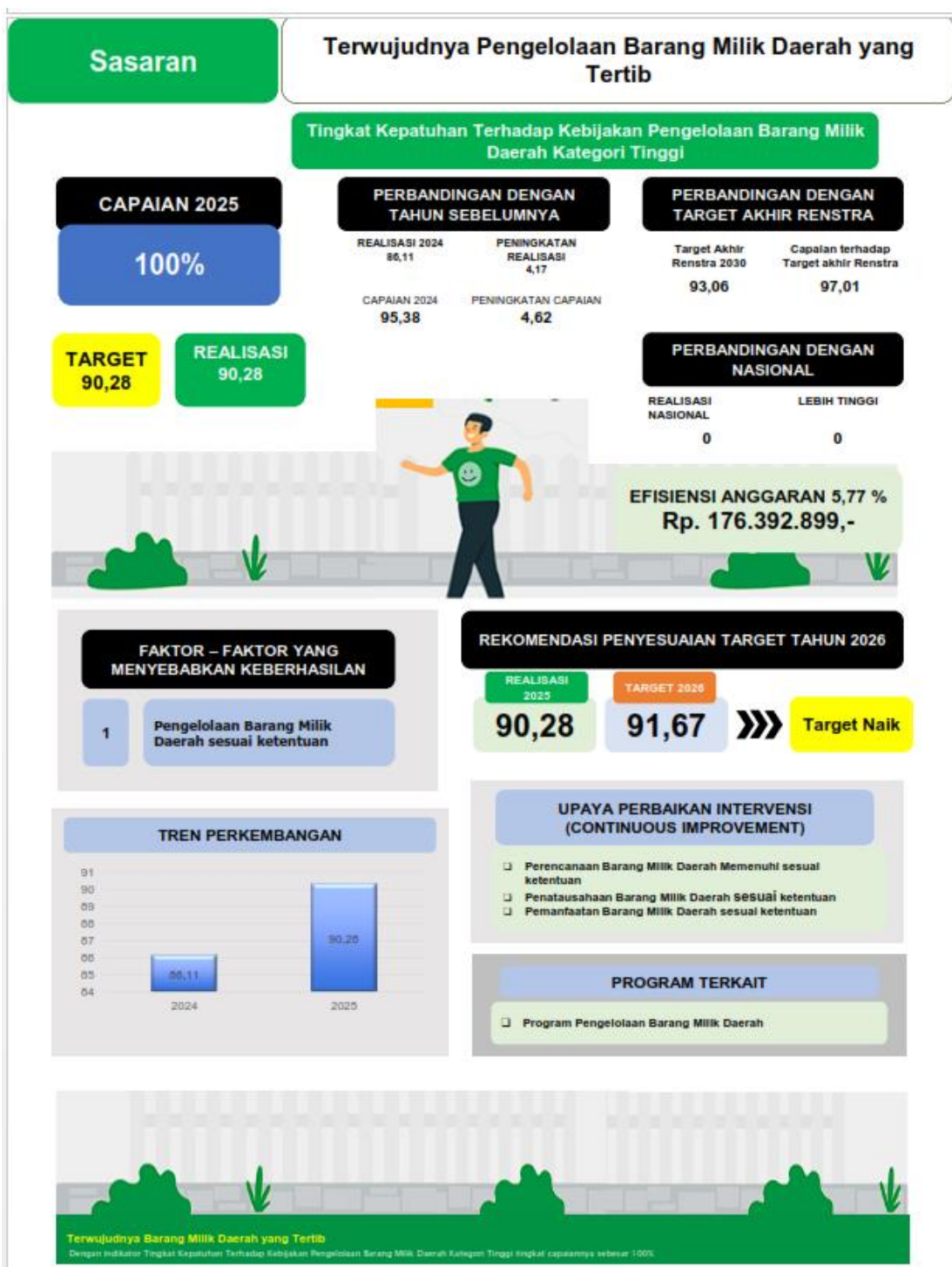
1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas; dan
2. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, pada tahun 2024 berhasil memperoleh apresiasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pencapaian ini merupakan hasil dari kerjasama, dan koordinasi secara berkesinambungan dan terintegrasi, dengan seluruh Perangkat Daerah di lingkup Kabupaten Bogor.



Capaian 2025 Sasaran BPKAD Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas

Kabupaten Bogor berhasil mewujudkan **Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas**. Capaian kinerja **Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi** telah mencapai harapan yaitu sebesar 100% dengan target sebesar 94,44 % dan terealisasi sebesar 94,44%. Realisasi Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi sebesar 94.44 % artinya sebanyak 68 SKPD dari 72 SKPD memiliki tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dengan kategori tinggi di Kabupaten Bogor.



Capaian 2025 Sasaran BPKAD Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Berkualitas

Kabupaten Bogor berhasil mewujudkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Berkualitas. Capaian kinerja Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi telah mencapai harapan yaitu sebesar 100% dengan target sebesar 90,28 % dan terealisasi sebesar 90,28%. Realisasi Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi sebesar 90.28 % artinya sebanyak 65 SKPD dari 72 SKPD memiliki tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan barang milik daerah dengan kategori tinggi di Kabupaten Bogor.

Adapun anggaran yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun 2025 yaitu:

1. Pendapatan Daerah sebesar Rp. 6.933.602.134.920,00 terealisasi sebesar Rp. 6.303.793.099.705,00 yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 587.628.698.425,00 terealisasi sebesar Rp. 165.040.381.541,00;
 - b. Pendapatan Transfer sebesar Rp. 6.339.314.108.620,00 terealisasi sebesar Rp. 6.125.565.034.246,00;
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 6.659.327.875,00 terealisasi sebesar Rp. 13.187.683.918,00.
2. Anggaran Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.877.105.253.813,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.816.373.781.704,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp 53.615.244.218,75 terealisasi sebesar Rp 46.677.791.463,00;
 - Anggaran Belanja Modal sebesar Rp 4.514.849.172,25 terealisasi sebesar Rp 4.349.570.482,00;
 - Anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 93.247.135.678,00 terealisasi sebesar Rp 83.480.481.684,00;
 - Anggaran Belanja Transfer sebesar Rp 1.725.728.024.744,00 terealisasi sebesar Rp 1.681.865.938.075,00.

Berdasarkan uraian diatas, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempertahankan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh PPTK dalam lingkungan BPKAD Kabupaten Bogor dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan baik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan maupun pengelolaan barang daerah.
2. Mempertahankan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor dalam rangka antisipasi serta mencari solusi pemecahan dari setiap permasalahan yang ada untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang daerah.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas Perangkat Daerah. Untuk tahun 2026, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

BAB I BERISI :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan tujuan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
- 1.5 Peta Proses Bisnis
- 1.6 Struktur Organisasi
- 1.7 Tugas dan Fungsi
- 1.8 Isu Strategis
- 1.9 Sumber Daya Manusia
- 1.10 Keadaan Sarana dan Prasarana
- 1.11 Anggaran Tahun 2025
- 1.12 Tindaklanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2024
- 1.13 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Penyusunan LKIP dilakukan berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini

bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah, BPKAD Kabupaten Bogor berkewajiban menyusun LKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Penyusunan LKIP ini juga bertujuan untuk mengukur pencapaian kinerja BPKAD Kabupaten Bogor sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan.

Selain itu, penyusunan LKIP BPKAD Kabupaten Bogor merupakan bagian dari upaya untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya LKIP, diharapkan BPKAD Kabupaten Bogor dapat memberikan informasi yang jelas dan terukur mengenai kinerja yang telah dicapai serta langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Penyusunan LKIP ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan reformasi birokrasi, khususnya dalam aspek akuntabilitas kinerja. Dengan adanya laporan ini, diharapkan dapat dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan serta menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dalam perencanaan dan penganggaran di masa mendatang.

Dengan demikian, penyusunan LKIP BPKAD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025 diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam mengukur dan meningkatkan kinerja instansi, serta memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2024** bertujuan untuk mendokumentasikan serta menyajikan capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor selama tahun anggaran 2025. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tujuan

1. Evaluasi Kinerja

- Menilai sejauh mana capaian indikator kinerja utama (IKU) dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 BPKAD Kabupaten Bogor.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

- Memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada stakeholder mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Memastikan bahwa anggaran yang digunakan sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas publik.

3. Perbaikan Tata Kelola Keuangan Daerah

- Mengidentifikasi kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan program kerja guna meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik di tahun berikutnya.

4. Pemenuhan Kewajiban Regulasi

- o Memenuhi amanat peraturan perundang-undangan terkait penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

5. Penyusunan Rencana Kerja Tahun Berikutnya

- o Menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, strategi, dan perencanaan program untuk meningkatkan kinerja BPKAD Kabupaten Bogor di tahun mendatang.

Dengan adanya LKIP ini, diharapkan pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, serta mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor.

1.3 Dasar Hukum

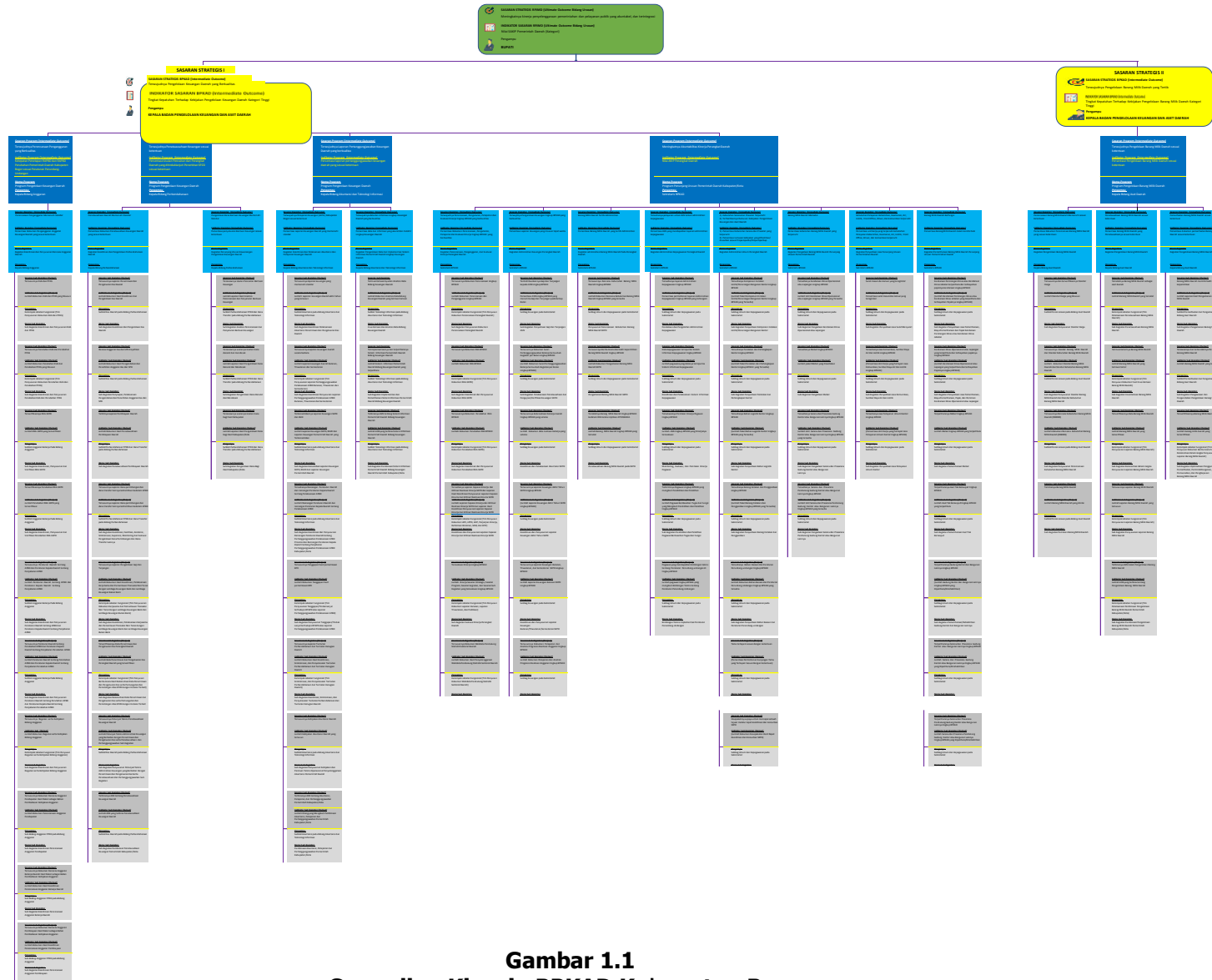
Landasan hukum penyusunan LKIP BPKAD Kabupaten Bogor tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun

- 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24);
 8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 34).



1.4 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah



Gambar 1.1
Cascading Kinerja BPKAD Kabupaten Bogor

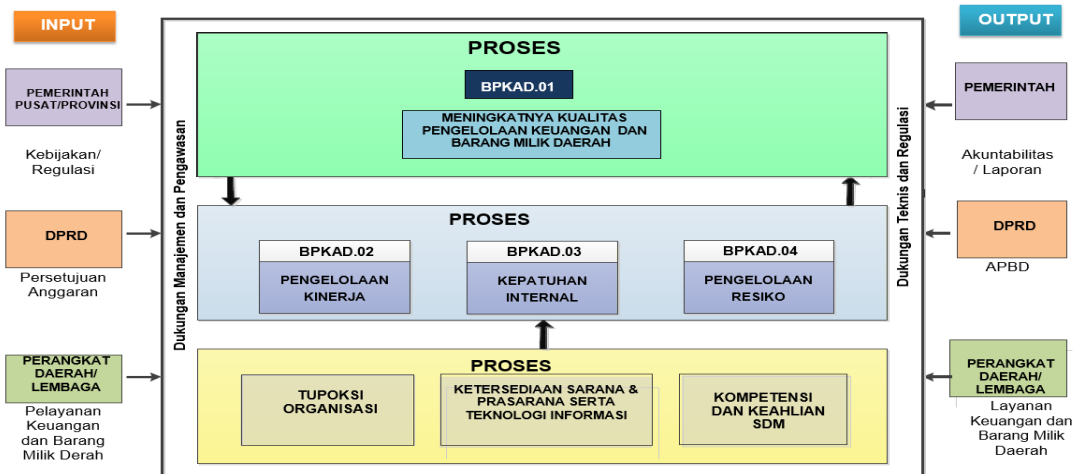
1.5 Peta Proses Bisnis

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor tentunya tidak lepas dari kelompok sasaran atau mitra dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor yang terdiri dari unsur :

1. Kementerian
 - Koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pemanfaatan aplikasi SIPD dan kebijakan dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
 - Koordinasi dan penyampaian laporan pada Kementerian Keuangan terkait dana perimbangan daerah dan dana transfer.
2. Provinsi Jawa Barat
 - Koordinasi dan konsultasi dengan Provinsi Jawa Barat terkait dengan bantuan provinsi (penerimaan dan belanja)
3. DPRD Kabupaten Bogor
 - Penetapan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) terkait pengelolaan keuangan daerah.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Bogor
 - Koordinasi dan konsultasi terkait Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - Pembinaan dan penyusunan perencanaan anggaran SKPD.
 - Penatausahaan keuangan SKPD.
 - Koordinasi terkait reviu APIP.
5. Lembaga
 - Koordinasi dengan lembaga perbankan (BJB dan BRI) terkait dengan penyertaan modal sebagai dasar dalam penerimaan lain-lain PAD yang sah dan pengelolaan kas daerah.
6. Pemerintahan Desa
 - Penatausahaan bantuan keuangan Pemerintah Desa.

Dalam hal ini sesuai dengan Peta Proses Bisnis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor dapat digambarkan sebagai berikut :

PETA PROSES BISNIS BPKAD KABUPATEN BOGOR



Gambar 1.2
Peta Proses Bisnis BPKAD Kabupaten Bogor

1.6 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
5. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor terdiri dari :

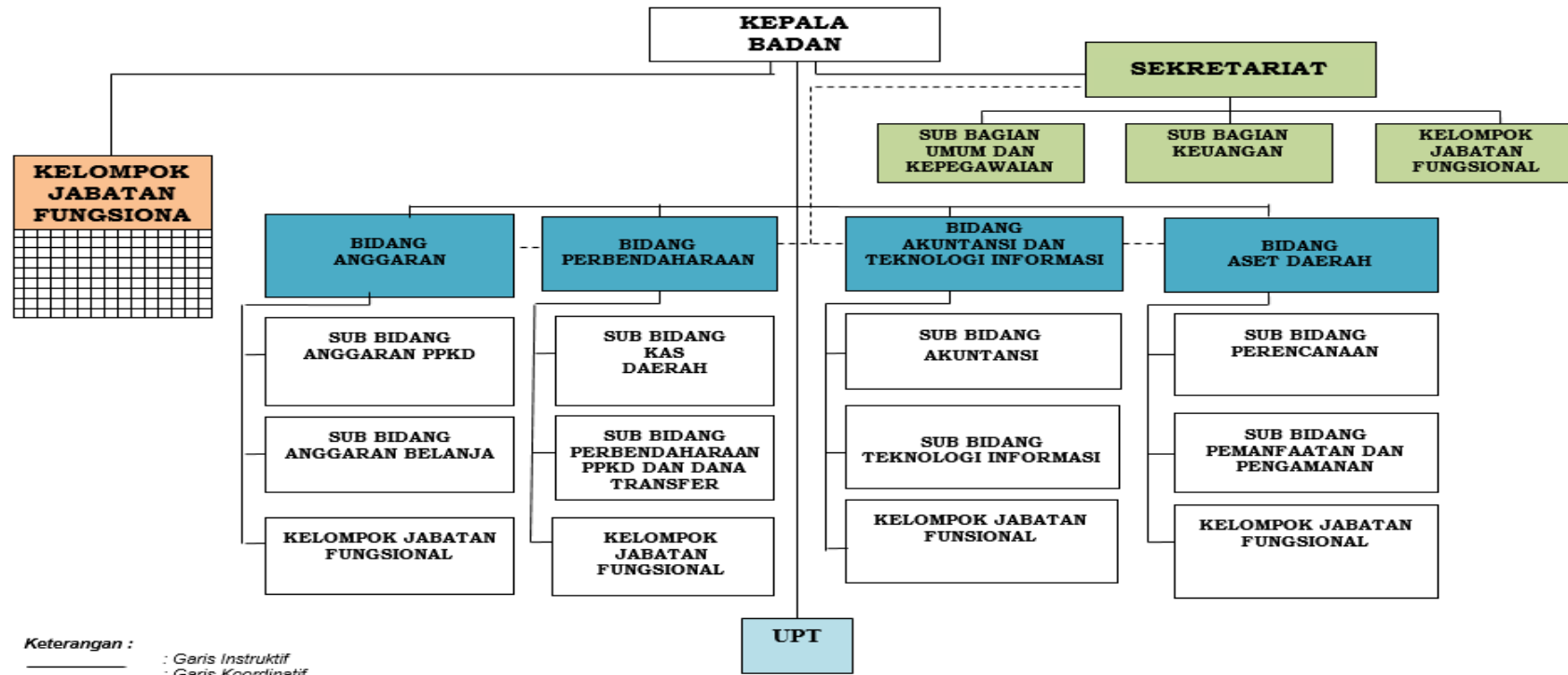
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Anggaran, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Anggaran Belanja;
 - b. Sub Bidang Anggaran PPKD; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Kas Daerah;
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan PPKD dan Dana Transfer; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Akuntansi;
 - b. Sub Bidang Teknologi Informasi; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Aset Daerah, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Perencanaan;
 - b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor, disajikan dalam gambar 1.2.



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR : 24 TAHUN 2022
TANGGAL : 4 JANUARI 2022
TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Gambar 1.3
Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor
Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022



1.7 Tugas dan Fungsi

Adapun tugas dan fungsi dari Sekretariat dan masing-masing Bidang adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan;
- b. Pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan;
- c. Pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
- d. Penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan;
- e. Pengelolaan keuangan Badan;
- f. Pengelolaan situs web Badan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu oleh :

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Sub Bagian Keuangan; dan
- c) Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan analisa kebijakan anggaran daerah;
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran PPKD dan pembiayaan;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran belanja daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Anggaran; dan



- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh:

- a) Sub Bidang Anggaran PPKD;
- b) Sub Bidang Anggaran Belanja; dan
- c) Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan perbendaharaan. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan kas daerah;
- b. Pengelolaan belanja pegawai;
- c. Pengelolaan anggaran PPKD dan Dana Transfer;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Perbendaharaan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh :

- a) Sub Bidang Kas Daerah;
- b) Sub Bidang Perbendaharaan PPKD dan Dana Transfer; dan
- c) Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi

Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan akuntansi dan teknologi informasi pelaporan keuangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan akuntansi keuangan daerah;
- b. Pengelolaan pelaporan keuangan daerah; dan
- c. Pengelolaan sistem informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh :

- a) Sub Bidang Akuntansi;
- b) Sub Bidang Teknologi Informasi: dan
- c) Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Bidang Aset Daerah

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan barang daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan analisis perencanaan barang milik daerah;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan penatausahaan barang milik daerah;
- c. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pengamanan dan pemanfaatan barang milik daerah;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Aset Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh :

- a) Sub Bidang Perencanaan;
- b) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan; dan
- c) Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Unit Pelaksana Teknis

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24) bahwa pada Badan dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Namun pada BPKAD tidak dibentuk UPT karena BPKAD memiliki tugas pengkoordinasian dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah.

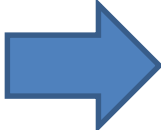
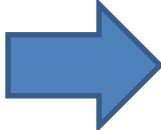
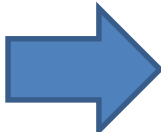
7. Kelompok Jabatan Fungsional



Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24), Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian, dan setiap kelompok jabatan fungsional akan dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan.

1.8 Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan utama yang menjadi isu mendasar terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Bogor. Adapun permasalahan dan isu strategis BPKAD pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

PERMASALAHAN		ISU STRATEGIS
1. Efisiensi dan efektivitas dalam penyusunan Perencanaan dan Pengelolaan APBD belum optimal		1. Perlunya Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Perencanaan dan Pengelolaan APBD
2. Penyusunan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah belum optimal		2. Perlunya Peningkatan penerapan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja
3. Pengelolaan Barang Daerah pada Perangkat Daerah belum optimal		3. Perlunya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Daerah pada Perangkat Daerah

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor dalam melaksanakan seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berprinsip secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.



1.9 Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Kondisi Umum Pegawai

Sumber daya Aset utama yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah Sumber Daya Manusia (SDM), jumlah ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor pada senester I tahun 2024 sebanyak 97 orang. Hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai BPKAD yang Menduduki Jabatan Struktural, Fungsional dan Fungsional Umum

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24), jumlah pegawai BPKAD sebanyak 97 orang yang terdiri dari 87 PNS dan 10 PPPK. Formasi jabatan struktural pada BPKAD terdiri dari eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 18 orang, Jabatan Fungsional sebanyak 8 orang dan sisanya sebanyak 71 orang adalah fungsional umum. Untuk selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai BPKAD yang Menduduki Jabatan dan Pelaksana s.d. Desember 2025

No	JABATAN/STAF	JUMLAH (orang)	%
1	Eselon II	1	1,03
2	Eselon III	5	5,15
3	Eselon IV	12	12,37
4	Fungsional	8	8,25
5	Fungsional Umum	71	73,20
	Jumlah	97	100



b. Jumlah Pegawai BPKAD Berdasarkan Golongan

Jumlah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menempati golongan IV sebanyak 11 orang, pegawai yang menempati golongan III sebanyak 71 orang, dan pegawai yang menempati golongan II sebanyak 5 orang orang. Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Menurut Golongan per Desember 2025

No.	Unit Wilayah	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat		1	16	3	21
2	Bidang Anggaran			11	1	12
3	Bidang Perbendaharaan		1	19	3	23
4	Bidang Akuntansi		1	7	3	12
5	Bidang Aset		1	18	1	20
Total			5	71	11	87

c. Jumlah Pegawai BPKAD Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai BPKAD Kabupaten Bogor per tahun 2025 terdiri dari pegawai dengan tingkat pendidikan tertinggi yaitu Pasca Sarjana (S-2) sebanyak 29 orang, pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana (S-1) sebanyak 57 orang, pegawai dengan tingkat pendidikan D-3 sebanyak 8 orang, dan pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA/Sederajat sebanyak 3 orang. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan per Desember 2025

No	Pendidikan	Jumlah (orang)	%
1	Pasca Sarjana (S-2)	29	29,90
2	Sarjana (S-1)	57	58,76
3	Diploma (D-3)	8	8,25
4	SLTA/Sederajat	3	3,09
5	SLTP/Sederajat	-	
Jumlah		97	100,00



d. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kesarjanaan/Disiplin Ilmu

Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat 29,90% pegawai dengan tingkat pendidikan Pasca Sarjana dengan 7 jenis disiplin ilmu sedangkan tingkat pendidikan sarjana sebesar 58,76% terdiri dari 13 jenis disiplin ilmu. Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan
Kesarjanaan/Disiplin Ilmu per Desember 2025

No	Kesarjanaan/Disiplin Ilmu	Jumlah (Orang)	%
A	PASCASARJANA (S-2)		
	1. Magister Manajemen (M.M)	12	12,37
	2. Magister Sains (M.Si)	8	8,25
	3. Magister Ilmu Hukum (M.H)	2	2,06
	4. Magister Teknik (M.T)	1	1,03
	5. Magister Administrasi (M.A)	4	4,12
	6. Magister Kenotariatan (M.Kn)	1	1,03
	7. Magister Provesional (M.P)	1	1,03
B	SARJANA (S-1)		
	1. Sarjana Ekonomi (S.E)	21	21,65
	2. Sarjana Akuntansi (S.Ak/S.Tr.Ak)	6	6,19
	3. Sarjana Hukum (S.H)	4	4,12
	4. Sarjana Ilmu Administrasi Publik (S.AP)	10	10,31
	5. Sarjana Teknik (S.T)	3	3,09
	6. Sarjana Komputer (S.Kom)	4	4,12
	8. Sarjana Sosial Ekonomi Pertanian (S.P)	1	1,03
	9. Sarjana Kehutanan (S.Hut)	1	1,03
	10. Sarjana Administrasi Negara (S.Sos)	4	4,12
	11. Sarjana Sastra (S.S)	1	1,03
	12. Sarjana Psikologi (S.Psi)	1	1,03
	13. Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.Ip)	1	1,03
	14. A.Md.	8	8,25
C	SLTA/SEDERAJAT	3	3,09
D	SLTP/SEDERAJAT	-	-
	JUMLAH	97	100,00

Berdasarkan disiplin ilmu, pegawai BPKAD secara garis besar telah memenuhi kualifikasi yang diperlukan oleh organisasi. Disiplin ilmu pegawai BPKAD yang bervariasi sangat dibutuhkan dalam perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan barang daerah di Kabupaten Bogor, dengan demikian diharapkan kompetensi kedisiplinan ilmu yang ada menjadikan pengelolaan keuangan dan barang daerah di Kabupaten Bogor semakin berkualitas.



1.10 Keadaan Sarana dan Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana yang tersedia pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor cukup memadai, namun belum optimal karena adanya kondisi barang kurang baik (KB) dan rusak berat (RB) hal ini dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 1.5
Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor per Desember 2025

NO	URAIAN	VOL	SATUAN	KONDISI			KETERANGAN
				B	KB	RB	
I	TANAH						
1	Tanah Darat P 94 m x L 42,20 m	3.966,80	m2	1			Satu hampan Sertifikat No.06/2000 Tgl.20 Maret 2000
II	BANGUNAN						
1	Gedung Kantor Dinas 1	1.620	m2	1			
2	Gedung Kantor Dinas 2	700.4	m2	1			
3	Gedung Kantor Dinas 3 (Sekret)	820	m2	1			IMB No.644.4/003.2.1/ 00765/BPMPTSP/2015 Tgl. 31 Des '15
4	Gedung Gudang BPKAD	872	m2		1		Sertifikat Tanah No.03/2001 Tgl.29/11/2001
5	Mushola	40	m2	1			
6	Rumah Genset 1	8	m2	1			
7	Rumah Genset 2	10	m2	1			
8	Lahan Tempat Parkir	2	Tempat	1			
9	Pos Keamanan 1	20	m2		1		
10	Pos Keamanan 2	2.25	m2		1		
11	Pos Keamanan 3 (Gudang)	6	m2		1		
12	Halaman Kantor	1,600	m2		1		
13	Listrik	2	Jaringan	2			
14	PAM Air	1	Jaringan	1			
15	Ruang Rapat	4	Ruang	4			
16	Kendaraan Roda 6	1	unit	1			
17	Kendaraan Roda 4	24	unit	21	3		
18	Kendaraan Roda 2	39	unit	22	15	2	
19	AC	80	unit	50	25	5	
20	Komputer PC	195	unit	118	48	29	
21	Notebook Laptop	199	unit	45	45	109	
22	Printer	152	unit	90	18	44	
23	Meja Kerja	84	buah	56	17	11	
24	Meja Rapat	105	buah	95	7	3	



NO	URAIAN	VOL	SATUAN	KONDISI			KETERANGAN
				B	KB	RB	
25	Kursi Kerja	76	buah	61	10	5	
26	Kursi Rapat	366	buah	356	6	4	
27	Filling Kabinet	6	buah	4	1	1	
28	Rak Arsip	73	buah	20	38	15	
29	Proyektor	28	unit	13	7	8	
30	Jaringan Internet	2	Line	1	1		
31	Area Taman luar	2	Area	2			
32	Lemari arsip/besi	630	buah	550	48	32	
33	Lemari Kaca sorok	34	buah	15	19	3	
34	Sound System	89	unit	57	15	17	
35	Kursi Tamu/sofa	26	buah	14	5	4	
36	Papan tulis elektrik	1	unit			1	
37	Pesawat Telepon	16	unit		3	13	
38	Rak Kayu	16	buah	5	11		
39	Televisi	17	unit	9	3	5	
40	Whiteboard	3	buah		1	2	
41	Wireles	2	unit		2		
42	Camera	5	unit	1	3	1	
43	Mesin Tik	2	unit			2	
44	Handycam	1	buah		1		
45	Handkey	4	unit		2	2	
46	Kubikal	35	Set		30	5	
47	CCTV	4	Set	4	2		
48	Penghancur Kertas	18	unit	7	5	6	
49	Tabung Pemadam Kebakaran	20	unit	13	5	2	
50	Genset Merk Perkin 80 KVA	1	unit	1			
51	Genset Merk Highlander 80 KVA	1	unit		1		

1.11 Anggaran Tahun 2025

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPKAD tahun 2025 berasal dari APBD Kabupaten Bogor. Alokasi Anggaran Perubahan diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

1.11.1 Target Belanja Perangkat Daerah

Rencana Kinerja Tahun 2025 merupakan rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.

Rencana Kerja merupakan cerminan dari rencana program ataupun kegiatan serta sasaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor adalah



Perangkat Daerah yang mengampu salah satu visi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 yaitu : **"Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang"**.

Pencapaian sasaran ini diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD atau indikator sebagai berikut:

- Indikator Tujuan:
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Indikator Sasaran:
 1. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi
 2. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi

Tabel 1.6
Pendapatan Daerah BPKAD Tahun 2025

No	URAIAN	ANGGARAN
1	2	3
	Pendapatan Daerah	
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	587.628.698.425,00
	Pendapatan Transfer	6.339.314.108.620,00
	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.659.327.875,00
	Jumlah Pendapatan Daerah	6.933.602.134.920,00

Tabel 1.7
Belanja Daerah BPKAD Tahun 2025

No	URAIAN	ANGGARAN
1	2	3
	Belanja Daerah	
	Belanja Operasi	53.615.244.218,75
	Belanja Modal	4.514.849.172,25
	Belanja Tidak Terduga	93.247.135.678,00
	Belanja Transfer	1.725.728.024.744,00
	Jumlah Belanja Daerah	1.877.105.253.813,00

Anggaran perubahan sebesar **1.877.105.253.813,00** untuk mendanai 3 (tiga) Program, 14 Kegiatan, 85 Subkegiatan. Berikut ini Anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tabel berikut:



Tabel 1.8
Anggaran Perubahan Tahun 2025 per Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.877.105.253.813,00
5	02	02	2.01		Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	6.498.014.428,50
5	02	02	2.01	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	570.382.127,00
5	02	02	2.01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	501.499.900,00
5	02	02	2.01	03	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	103.872.435,00
5	02	02	2.01	04	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	122.889.955,00
5	02	02	2.01	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.581.042.472,50
5	02	02	2.01	08	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2.040.045.528,00
5	02	02	2.01	09	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	862.125.518,00
5	02	02	2.01	10	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	137.211.114,00
5	02	02	2.01	11	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	274.449.808,00
5	02	02	2.01	12	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	304.495.571,00
5	02	02	2.02		Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.494.431.425,00
5	02	02	2.02	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	333.769.674,00
5	02	02	2.02	03	Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	59.514.776,00
5	02	02	2.02	04	Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	188.937.592,00
5	02	02	2.02	05	Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	237.743.047,00
5	02	02	2.02	06	Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	111.570.503,00



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
5	02	02	2.02	09	Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	312.907.630,00
5	02	02	2.02	11	Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	249.988.203,00
5	02	02	2.03		Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.117.689.398,00
5	02	02	2.03	01	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	211.044.207,00
5	02	02	2.03	03	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	280.233.301,00
5	02	02	2.03	04	Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	80.864.348,00
5	02	02	2.03	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	163.815.574,00
5	02	02	2.03	06	Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	80.569.170,00
5	02	02	2.03	07	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	61.919.529,00
5	02	02	2.03	09	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	154.738.534,00
5	02	02	2.03	11	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	84.504.735,00
5	02	02	2.04		Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.818.975.160.422,00
5	02	02	2.04	08	Sub Kegiatan Analisa Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1.445.918.607.968,00
5	02	02	2.04	09	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Menedesak	93.247.135.678,00
5	02	02	2.04	10	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	279.809.416.776,00
5	02	02	2.05		Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	843.910.638,00



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
5	02	02	2.05	01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	61.265.749,00
5	02	02	2.05	02	Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	480.098.704,00
5	02	02	2.05	03	Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	302.546.185,00
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.056.605.046,00
5	02	03	2.01		Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.056.605.046,00
5	02	03	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	240.954.459,00
5	02	03	2.01	02	Sub Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	105.932.046,00
5	02	03	2.01	03	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	219.421.115,00
5	02	03	2.01	04	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	219.989.928,00
5	02	03	2.01	05	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	252.482.319,00
5	02	03	2.01	06	Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	77.191.156,00
5	02	03	2.01	07	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	509.830.367,00
5	02	03	2.01	08	Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	343.482.727,00
5	02	03	2.01	09	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	340.312.912,00
5	02	03	2.01	10	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	216.812.613,00
5	02	03	2.01	11	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	116.870.178,00
5	02	03	2.01	12	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	217.421.594,00
5	02	03	2.01	13	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	195.903.632,00
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	45.119.442.455,00
5	02	01	2.01		Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	652.963.156,00
5	02	03	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	96.470.136,00



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
5	02	03	2.01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	40.129.564,00
5	02	03	2.01	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	40.523.712,00
5	02	03	2.01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	143.716.703,00
5	02	03	2.01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	301.316.908,00
5	02	03	2.01	08	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	30.806.133,00
5	02	03	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan	30.862.022.809,50
5	02	03	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30.454.806.860,50
5	02	03	2.02	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	79.742.973,00
5	02	03	2.02	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	37.751.823,00
5	02	03	2.02	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	46.810.395,00
5	02	03	2.02	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	210.581.498,00
5	02	03	2.02	08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	32.329.260,00
5	02	03	2.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	124.110.771,00
5	02	03	2.03	01	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	16.698.573,00
5	02	03	2.03	02	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	92.099.154,00
	02	03	2.03	06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.313.044,00
5	02	03	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	184.917.875,00
5	02	03	2.05	03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25.396.551,00
5	02	03	2.05	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	19.659.276,00
5	02	03	2.05	05	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20.387.048,00
5	02	03	2.05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	112.500.000,00
5	02	03	2.05	10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6.975.000,00
5	02	03	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.697.054.868,00



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
5	02	03	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	262.391.013,00
5	02	03	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	963.876.383,00
5	02	03	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	193.933.522,00
5	02	03	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	248.800.950,00
5	02	03	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	160.704.000,00
5	02	03	2.06	08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	112.375.000,00
5	02	03	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	754.974.000,00
5	02	03	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.471.386.464,00
5	02	03	2.07	02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.663.647.568,00
5	02	03	2.07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	913.440.867,00
5	02	03	2.07	10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	266.794.050,00
5	02	03	2.07	11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	627.503.979,00
5	02	03	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.027.776.572,00
5	02	03	2.08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	308.653.670,00
5	02	03	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.511.500.000,00
5	02	03	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.207.622.902,00
5	02	03	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.099.209.940,00
5	02	03	2.09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	156.090.000,00
5	02	03	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	610.250.000,00
5	02	03	2.09	05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	12.000.000,00
5	02	03	2.09	08	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	140.000.000,00



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
5	02	03	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	823.146.840,00
5	02	03	2.09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	61.703.100,00
5	02	03	2.09	11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	296.020.000,00
Jumlah :						1.877.105.253.813,00

1.11.2 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

Anggaran belanja Tahun Anggaran Perubahan 2025 dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 1.9
Anggaran Belanja per Sasaran Strategis

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Presentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	1.828.929.206.311,00	97,43	Presentase dihitung berdasarkan total belanja dikurangi program penunjang sebesar Rp 45.119.442.455,00
2	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	3.056.605.046,00	0,16	

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor mengampu 3 (tiga) program terdiri dari 1 (satu) program penunjang dengan 8 (delapan) kegiatan dan 41 subkegiatan serta 2 (dua) program utama dengan 6 (Enam kegiatan) dan 44 (empat puluh empat) subkegiatan, dengan anggaran belanja sebagai berikut:

Tabel 1.10
Anggaran Belanja per Program Utama

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Presentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.828.929.206.311,00	97,43	Presentase dihitung berdasarkan total belanja dikurangi program penunjang sebesar Rp 45.119.442.455,00
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.056.605.046,00	0,16	



1.12 Tindaklanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2024

Berikut ini merupakan tindaklanjut saran / rekomendasi berdasarkan Surat Inpektorat Kabupaten Bogor Nomor 700.1.2.1/243-itban II/2025 Tanggal 25 April 2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2024.

Tabel 1.11
Tindaklanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2024

NO	Hasil Evaluasi Per Komponen AKIP 2024	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut
1	Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Memerintahkan Sekretaris dan seluruh Kepala Bidang agar secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi internal terhadap realisasi capaian kinerja serta mendokumentasikan seluruh pelaksanaan kegiatan	1 Membuat surat perintah Kepala BPKAD
			2 Melaksanakan monitoring dan evaluasi internal terhadap realisasi capaian kinerja
			3 Mendokumentasikan kegiatan
2	Evaluasi Pelaporan Kinerja	Mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya	1 Membuat surat perintah Kepala BPKAD
			2 Dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
3	Evaluasi atas Pelaporan Kinerja	Memerintahkan Sekretaris dan seluruh Kepala Bidang agar menyusun SOP atau pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor	1 Membuat surat perintah Kepala BPKAD
			2 Menyusun SOP dan Pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Internal BPKAD

Terlampir Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2024 beserta Tindak Lanjut Hasil Evaluasi.



1.13 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD Kabupaten Bogor tahun 2025 disusun sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif yang berisi penjelasan capaian indikator sasaran.
2. BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi Penjelasan umum organisasi antara lain struktur organisasi, fungsi dan tugas, isu strategis, keadaan sumber daya, keadaan pegawai, keadaan sarana dan prasarana, keuangan dan sistematika LAKIP.
3. BAB II PERENCANAAN KINERJA
Bab ini berisi Perencanaan Strategis, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dan Rencana Anggaran Tahun 2026.
4. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Bab ini berisi capaian kinerja tahun 2025 dan realisasi anggaran Tahun 2025 disertai dengan beberapa perbandingan antara target dan realisasi kinerja.
5. BAB IV PENUTUP
Bab ini berisi Kesimpulan, Rencana Tindak Lanjut, dan pemanfaatan laporan kinerja oleh pimpinan Perangkat Daerah sebagai umpan balik dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
6. LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB II BERISI :

- 2.1 Rencana Strategis 2025-2029
 - 2.1.1 Tujuan, Sasaran, dan Sasaran Indikator
 - 2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan
- 2.2 Perjanjian Kinerja 2025
- 2.3 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029 dan memenuhi Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025.

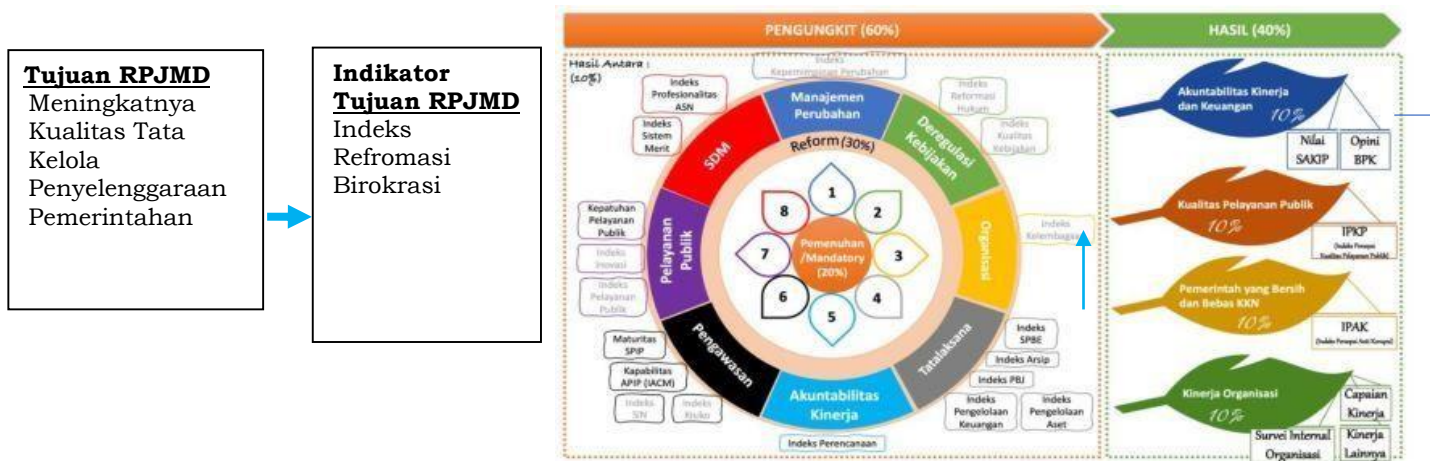
2.1 Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2025. Selanjutnya Renstra 2025-2029 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah saat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Tujuan, sasaran, indikator program dan kegiatan yang tertuang di dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

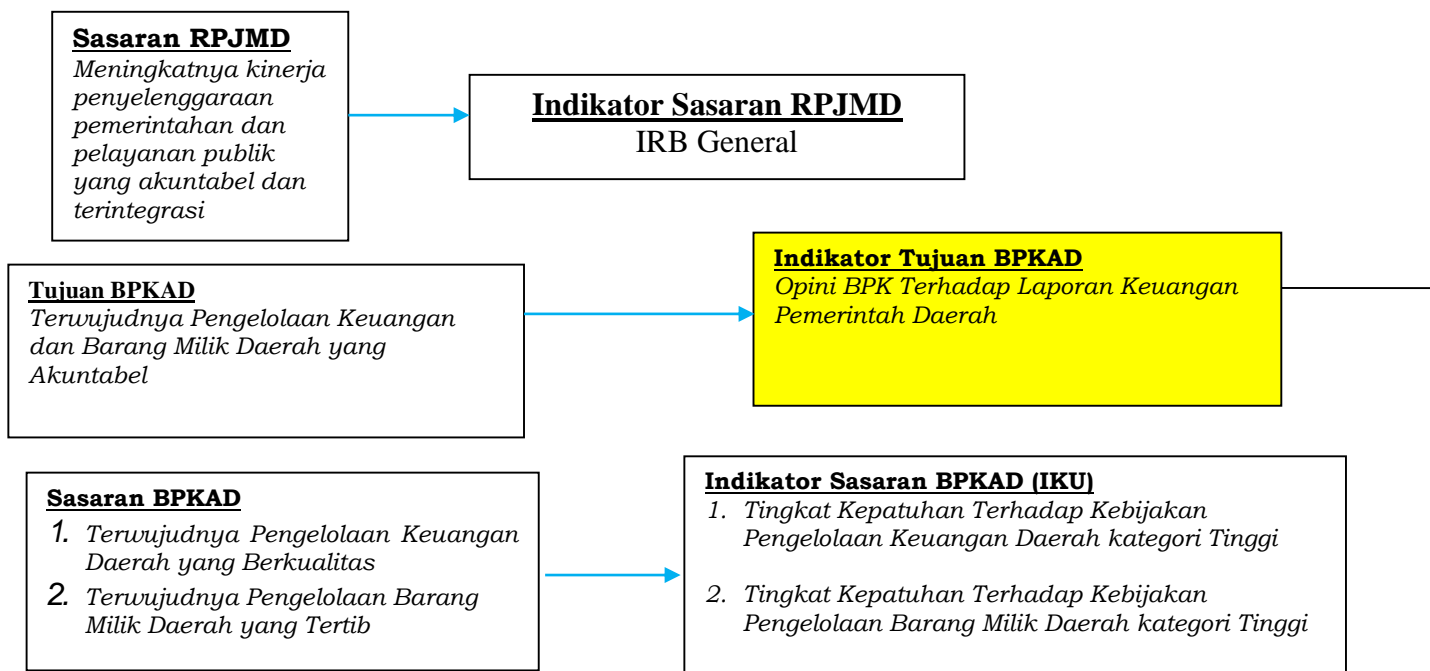
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Daerah kabupaten/kota menjadi pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karenanya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor menyusun dan menetapkan Renstra BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.

Mengacu pada tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor yaitu "Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan" dengan indikator tujuan yaitu Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Pemerintah Daerah maka ditetapkan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor yang akan dijadikan dasar dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2025-2029.



Sumber : Permenpan RB No. 26 Tahun 2020



Sumber : BPKAD, diolah, 2025

Gambar 2.1.

Penjabaran Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor berkaitan dengan Indikator Kinerja Utama BPKAD Tahun 2025

2.1.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

1. Tujuan

Tujuan Pemerintah Daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 adalah **Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan Indikator Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).**

Adapun Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor sesuai Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 adalah **Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel** Dengan Indikator Tujuan yaitu:

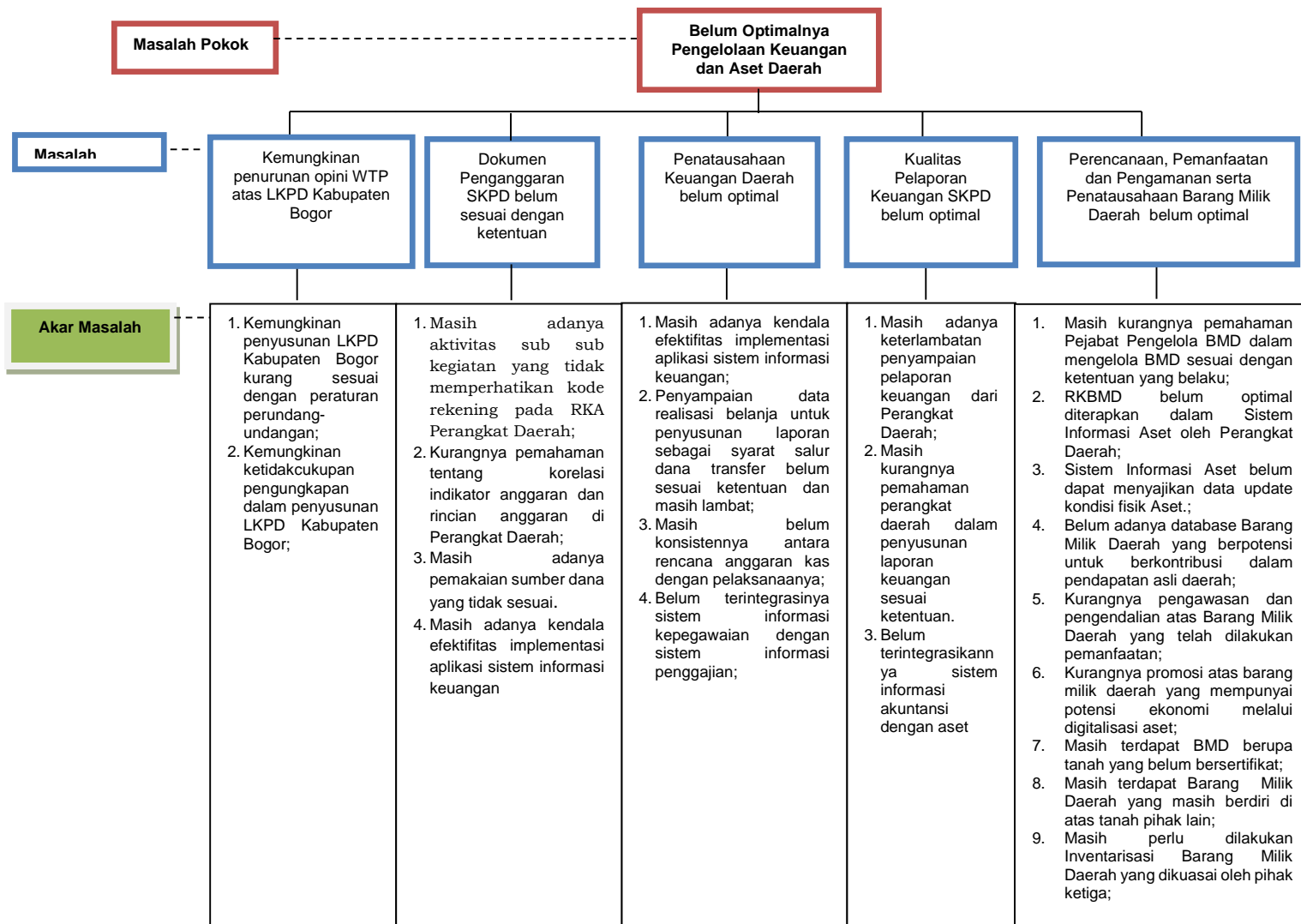
Awal: Tingkat Pemenuhan Kriteria Opini Laporan Keuangan yang Wajar

Berubah menjadi: **Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Tabel 2.1.

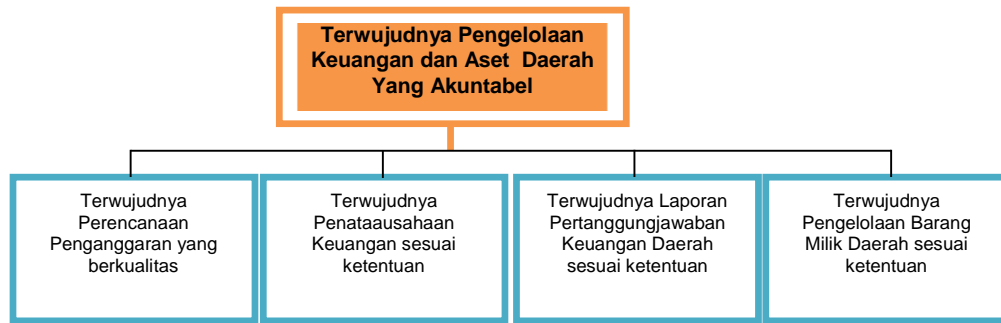
Perumusan Indikator Tujuan BPKAD Tahun 2025 – 2029

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN PERANGKAT DAERAH	RUMUS	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	TARGET TAHUN 2027	TARGET TAHUN 2028	TARGET TAHUN 2029	TARGET TAHUN 2030
				VOLUME	VOLUME	VOLUME	VOLUME	VOLUME	VOLUME
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Opini BPK	Hasil Evaluasi / Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

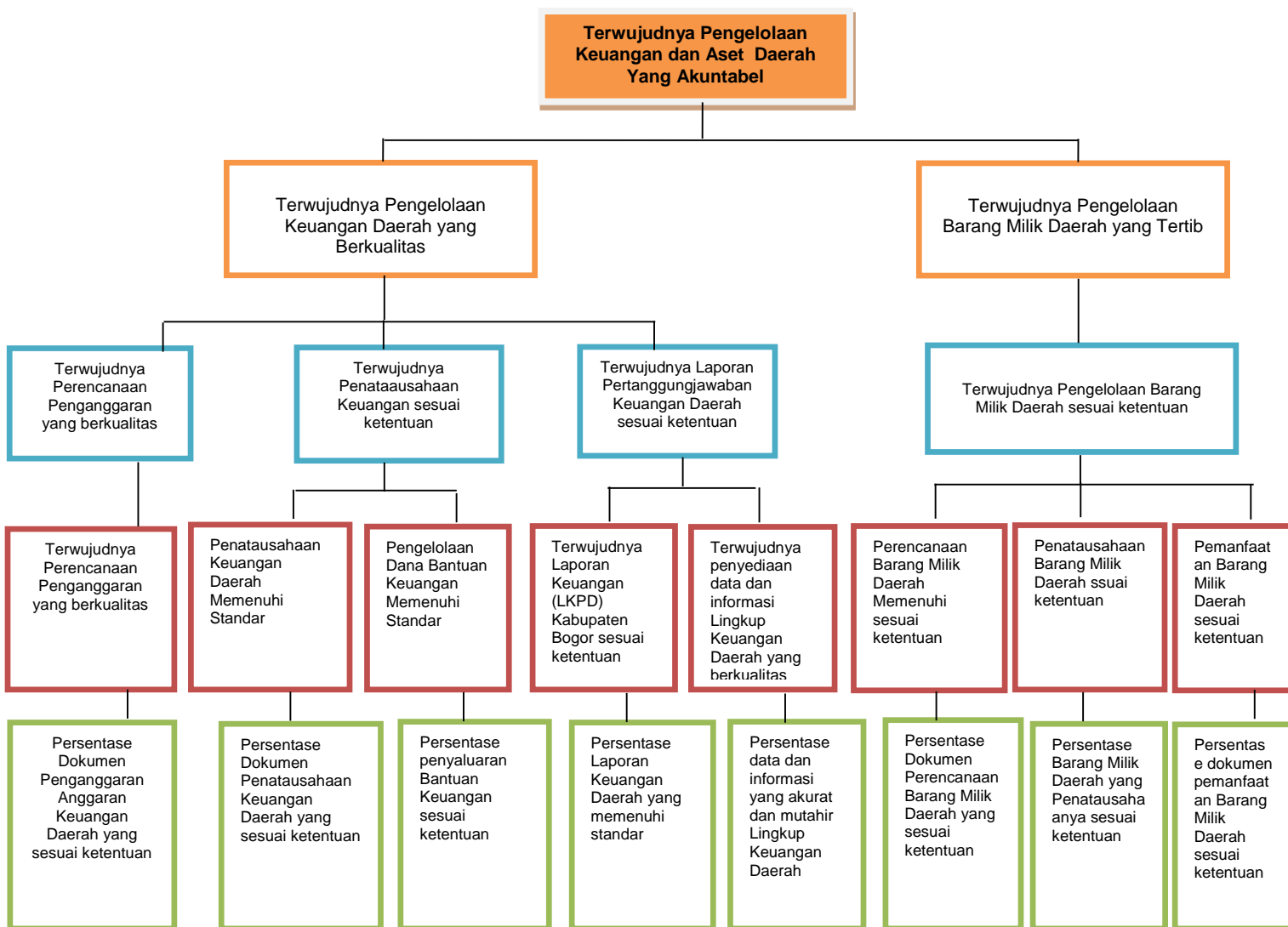


Gambar 2.2

Analisa Pohon Masalah



Gambar 2.3.
Analisa Pohon Tujuan



Gambar : 2.4.
Analisa Ukuran Keberhasilan (Indikator)

2. Sasaran

Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor tahun 2025 -2029 adalah **“meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel dan terintegrasi”**.

Dengan **Indikator Sasaran** yaitu :

Awal: Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berubah menjadi: Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) General

Adapun **sasaran** yang hendak dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas;
2. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib.

Pencapaian sasaran pertama Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas diukur melalui Indeks Kinerja Utama (IKU) atau indikator sebagai berikut:

- ✚ *Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi*

Pencapaian Sasaran yang kedua yaitu Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib, Pencapaian sasaran ini diukur melalui Indeks Kinerja Utama (IKU) atau indikator yaitu :

- ✚ *Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi.*

Tabel 2.2 Indikator Sasaran BPKAD Berdasarkan Renstra 2025 – 2029

Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					Keterangan	
			2025	2026	2027	2028	2029		2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi	93,06	94,44	95,83	95,83	95,83	95,83	97,22	BPKAD
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi	86,11	90,28	91,67	91,67	93,06	93,06	93,06	BPKAD



Tabel 2.3

Tujuan dan Sasaran Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

TUJUAN DAN SASARAN PEMERINTAH DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PEMERINTAH DAERAH	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	RUMUS	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						KETERANGAN
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TUJUAN PEMERINTAH DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PEMERINTAH DAERAH	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PD										
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<i>Hasil Evaluasi / Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
SASARAN PEMERINTAH DAERAH	INDIKATOR SASARAN PEMERINTAH DAERAH (IKU)	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PD (IKU)										
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel, dan terintegrasi	Nilai SAKIP	1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah dengan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangannya Daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100$	%	93.06	94.44	95.83	95.83	95.83	95.83	97.22	BPKAD
		2. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah dengan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100$	%	86.11	90.28	91.67	91.67	93.06	93.06	93.06	BPKAD

2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan ilmu, seni, langkah-langkah atau tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program utama yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sedangkan arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, dan konsisten. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Dalam merumuskan strategi apa yang akan ditempuh oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor, maka pada kesempatan pertama perlu dilakukan Analisa SWOT terhadap beberapa poin strategis yang berkaitan dengan faktor internal berupa Strength (Kekuatan) dan Weakness (Kelemahan), serta faktor eksternal berupa Opportunity (Peluang) dan Threat (Tantangan).

a. **Strength (Kekuatan)**

Dari aspek kekuatan internal, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki beberapa kekuatan di antaranya :

- 1) Komitmen Kepala Daerah dalam mendorong reformasi birokrasi termasuk didalamnya reformasi fiskal, hal ini dibuktikan dengan berhasilnya Pemerintah Kabupaten Bogor memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 5 Tahun berturut-turut sejak Tahun Anggaran 2016 s.d 2020, periode tahun anggaran 2021 s.d 2024 memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
- 2) Integritas aparatur pengelola keuangan dan aset di BPKAD;
- 3) Komitmen pimpinan organisasi untuk perbaikan pengelolaan keuangan dan aset.

b. Weakness (Kelemahan)

Pada aspek kelemahan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor memiliki beberapa kelemahan diantaranya :

- 1) Kompetensi, kapasitas dan kapabilitas ASN pengelola keuangan di BPKAD yang masih perlu ditingkatkan;
- 2) Belum tersusunnya seluruh standar operasional prosedur pengelolaan keuangan;
- 3) Keterbatasan kewenangan dan otorisasi pengembangan dan pengelolaan sistem informasi penunjang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

c. Opportunity (Peluang)

Pada aspek Peluang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor memiliki beberapa peluang di antaranya :

- 1) Perkembangan teknologi dan sistem informasi yang begitu pesat sebagai salah satu tools untuk menunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 2) Komitmen pemerintah pusat untuk melakukan reformasi pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset;

d. Threat (Ancaman)

Pada aspek tantangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor memiliki beberapa tantangan di antaranya :

- 1) Disrupsi teknologi yang menuntut keterbukaan dan percepatan akses informasi pengelolaan keuangan daerah;
- 2) Perkembangan inovasi pemerintah daerah lain dalam aspek inovasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 3) Pengakuan dari masyarakat terhadap aset milik Pemerintah Kabupaten Bogor secara sepihak;
- 4) Kompetensi SDM Pengelola Keuangan dan Aset Organisasi Perangkat Daerah yang masih harus ditingkatkan;
- 5) Belum optimal dan terintegrasinya system informasi pengelolaan keuangan dan aset

Tabel 2.4 Perumusan Strategi BPKAD Kabupaten Bogor

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Strategi
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	<i>Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan proses penyusunan APBD yang aspiratif, transparan dan akuntabel yang berorientasi kepada anggaran kinerja • Meningkatkan perencanaan pengelolaan keuangan daerah melalui Sosialisasi regulasi dan pembinaan • Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian, Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Prima • Meningkatkan pelayanan dan fasilitasi bagi Perangkat Daerah, Kecamatan/Desa dan Pihak Ketiga serta Stakeholder di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor • Meningkatkan pembinaan penatusahaan keuangan pemerintah daerah • Meningkatkan Sistem Pengelolaan Kepegawain Berbasis IT yang Efektif • Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis IT yang Efisien dan Efektif • Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD

Lanjutan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Strategi
1	2	3	4
2.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	<i>Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian, Pengelolaan dan Informasi Aset Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Prima • Menyusun perencanaan pengadaan dan pemanfaatan aset • Pengaturan Pengelolaan aset yang efisien, efektif dan akuntabel • Meningkatkan pembinaan, koordinasi dan perencanaan pengelolaan aset daerah • Meningkatkan Sistem Pengelolaan aset Daerah Berbasis IT yang Efisien dan Efektif • Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian, Pengelolaan dan Informasi Aset Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Prima • Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder yang terkait

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya yang ditandatangani oleh Bupati Bogor.

Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Aset Kabupaten Bogor Tahun 2025 disusun sesuai dengan DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025 yang bertujuan untuk menyesuaikan target yang hendak dicapai pada tahun yang bersangkutan.

Perjanjian Kinerja menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan berorientasi pada hasil (outcome), terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui perjanjian ini, pimpinan unit kerja berkomitmen untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, sedangkan atasan langsung melakukan supervisi, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaannya.

Perjanjian Kinerja memuat Sasaran, Indikator Kinerja, dan Program yang dilaksanakan, sasaran strategis yang akan dicapai, indikator sasaran berikut target kinerjanya, serta anggaran kegiatan yang tersedia sesuai dengan DPA/DPPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025.

Tabel 2.6 Sasaran, Indikator, dan Target BPKAD Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Target
		2025
1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas di Perangkat Daerah	- Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi	94,44%
2. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	- Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi	90.28%

Adapun Sasaran, Indikator, dan Target BPKAD pada Perjanjian Kinerja 2025 dapat disampaikan melalui Tabel berikut:

Tabel 2.6
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOGOR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat	WTP
2	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	%	94,44
3	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	88,89
4	Meningkatnya pelayanan kewenangan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Bidang Urusan Keuangan Daerah	Poin	82,50
5	Meningkatnya Pengelolaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Nilai Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Rp.	2.517.451.048

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. 1,947,088,469,744.00	APBD
2.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp. 2,748,488,173.00	APBD

PK Awal BPKAD tahun 2025 terlampir.

Pada tahun 2025, Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perubahan dilakukan karena ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOGOR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat	WTP
2	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	%	94,44
3	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	90.28
4	Meningkatnya Pengelolaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Nilai Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Rp.	2.517.451.048

Sesuai dengan DPPA BPKAD Tahun 2024, anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis, sebagai berikut:

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 47,619,442,456	APBD
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. 1,820,315,252,340	APBD
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp 3,056,605,046	APBD

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 BPKAD ini mencakup Tujuan , Sasaran Strategis, dan Sasaran Tambahan untuk penguat/memperluas orientasi kinerja. Poin-point yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Pada Tahun 2025 menjelaskan tentang:

1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel Merupakan Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Indikator tujuan: Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Target: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Tujuan ini merupakan tujuan strategis BPKAD yang mencerminkan kondisi ideal yang ingin dicapai dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah. Opini WTP dari BPK menjadi indikator tertinggi yang menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, didukung sistem pengendalian internal yang memadai, serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan ini menjadi arah utama seluruh program dan kegiatan BPKAD serta menjadi tolok ukur akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, Perjanjian Kinerja menetapkan dua sasaran utama yang ada dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas

Merupakan Sasaran Pertama Perangkat Daerah.

Indikator: Tingkat Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Target: 94,44%

Pada Sasaran ini mendukung Program BPKAD

- PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Sasaran ini bertujuan memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku. Tingkat kepatuhan yang tinggi akan meminimalkan temuan pemeriksaan serta meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga mendukung pencapaian opini WTP.

3. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib

Merupakan Sasaran Kedua Perangkat Daerah

Indikator: Tingkat Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Target: 88,89%

Pada Sasaran ini mendukung Program BPKAD yaitu PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Sasaran ini menekankan pentingnya ketertiban administrasi, penatausahaan, dan pengamanan Barang Milik Daerah. Kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan

aset akan meningkatkan akurasi pencatatan dan pelaporan aset daerah serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan secara keseluruhan.

4. Tambahannya Sasaran dalam Perjanjian Kinerja 2025

1. Meningkatnya Pelayanan Kewenangan Perangkat Daerah

Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Bidang Urusan Keuangan Daerah

Target: 82,50 poin

Sasaran ini merupakan penguatan dimensi pelayanan dalam kinerja BPKAD. Selain memastikan kepatuhan dan ketertiban administrasi, BPKAD juga dituntut memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan profesional kepada perangkat daerah dan masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat digunakan untuk mengukur kualitas layanan yang diberikan dan mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.

Sasaran tambahan ini tidak ditambahkan lagi pada Perjanjian Kinerja Perubahan 2025 karena adanya penyesuaian dan penajaman prioritas kinerja pada tahun berjalan. Dalam PK Perubahan, indikator yang dipertahankan adalah indikator yang memiliki keterkaitan langsung dan signifikan terhadap pencapaian tujuan strategis BPKAD, khususnya dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta optimalisasi penerimaan daerah.

2. Meningkatnya Pengelolaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Indikator: Nilai Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Target: Rp 2.517.451.048

Sasaran ini menunjukkan perubahan paradigma pengelolaan aset daerah dari sekadar tertib administrasi menjadi optimalisasi pemanfaatan aset untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan pengelolaan yang produktif dan sesuai ketentuan, aset daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan daerah dan mendukung kemandirian fiskal.

Tabel 2.8
REALISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOGOR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	TARGET 2025	REALISASI 2025
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP
2	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	94,4%	94,4%
3	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	90,28%	90,28%
4	Meningkatnya Pengelolaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Nilai Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Rp. 2.517.451.048	Rp. 3.901.377.816

1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel, indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ditargetkan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan realisasinya adalah WTP. Dengan demikian, capaian kinerja mencapai 100% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai.
 Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024 Terlampir.
2. Pada sasaran kedua, yaitu Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas, indikator Tingkat Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah ditargetkan sebesar 94,4% dan terealisasi sebesar 94,4%. Capaian ini menunjukkan tingkat keberhasilan sebesar 100% terhadap target yang ditetapkan, yang mencerminkan konsistensi dan kepatuhan perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan.
3. Pada sasaran ketiga, yaitu Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib, indikator Tingkat Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah ditargetkan sebesar 90,28% dan terealisasi sebesar 90,28%. Dengan demikian, capaian kinerja juga mencapai 100%, yang

menunjukkan bahwa pengelolaan dan penatausahaan aset daerah telah berjalan sesuai ketentuan.

4. Adapun pada sasaran keempat, yaitu Meningkatnya Pengelolaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah, indikator Nilai Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah ditargetkan sebesar Rp 2.517.451.048, sedangkan realisasinya mencapai Rp 3.901.377.816. Dengan demikian, realisasi pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah mencapai sekitar 155% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan optimalisasi pemanfaatan aset daerah serta efektivitas pengelolaan retribusi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara keseluruhan, realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa BPKAD Kabupaten Bogor tidak hanya mampu mencapai target yang ditetapkan, tetapi juga melampaui target pada aspek produktivitas pemanfaatan aset daerah, sehingga mencerminkan kinerja yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Terlampir Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Murni dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.

2.3 Struktur Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2025

PROGRAM UTAMA :

- **Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas**
- **Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib**

dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

- **Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi**

Sasaran ini dicapai melalui Program :

Program Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari 5 kegiatan dan 31 Sub-Kegiatan, sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;

- Terdiri dari Sub-Sub Kegiatan :
 1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS.
 2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
6. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
7. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
8. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
9. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan

2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;

- Terdiri dari sub-sub Kegiatan :
 1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 2. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 3. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
 4. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
 5. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
 6. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait
 7. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

3. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Terdiri dari sub-sub kegiatan:
 1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
 3. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

4. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;

- Terdiri dari sub-sub Kegiatan:
 1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 2. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
 3. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 4. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
 5. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 6. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
 7. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
 8. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

5. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Lingkup Keuangan Daerah;

- Terdiri dari sub-sub kegiatan:
 1. Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah
 2. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
 3. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

- **Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi**

Sasaran ini dicapai melalui 1 Program :

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 1 kegiatan dan 13 Sub-Kegiatan. sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik daerah;

- Adapun 13 Sub-kegiatan sebagai berikut:
 1. Penyusunan Buku Standar Harga;
 2. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah;
 3. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
 4. Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah;
 5. Kegiatan Penghapusan Barang Bekas Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Bogor;
 6. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 7. Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah;
 8. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 9. Penilaian Barang Milik Daerah;
 10. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 11. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 12. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
 13. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.

PROGRAM PENUNJANG:

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah BPKAD, pelaksanaan program penunjang ini dicapai 8 Kegiatan 41 Subkegiatan, sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Terdiri dari sub-sub Kegiatan:
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 6. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Terdiri dari sub-sub Kegiatan:
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Kegiatan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Terdiri dari sub-sub Kegiatan :
 1. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 3. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 4. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 5. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Terdiri dari sub-sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Terdiri dari sub-sub Kegiatan:
 1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 3. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 4. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Terdiri dari sub-sub Kegiatan:
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

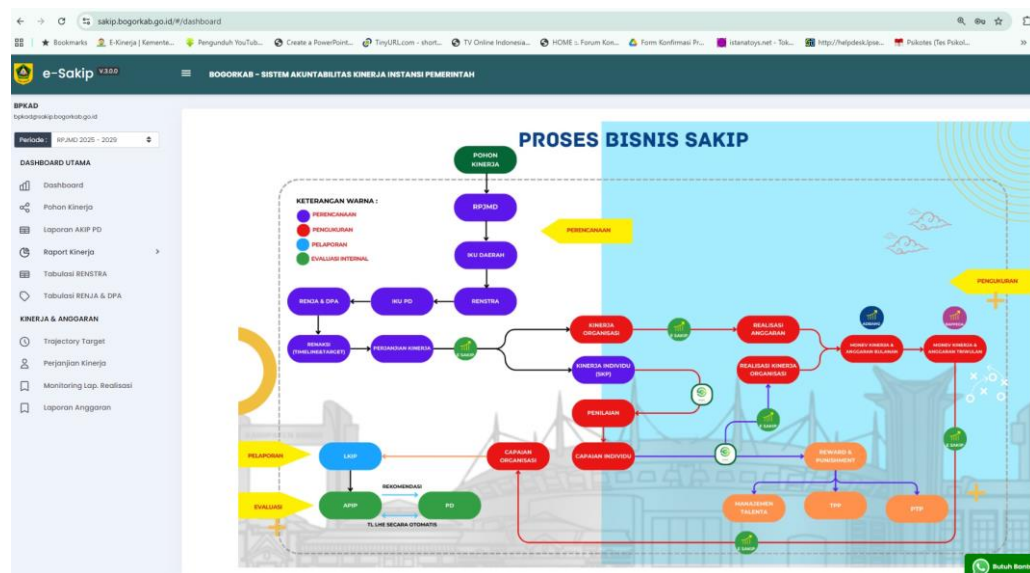
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Terdiri dari sub-sub Kegiatan :
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
 4. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 5. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 6. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 7. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor adalah <https://sakip.bogorkab.go.id/> Aplikasi ini menampilkan tentang Data Perencanaan, Realisasi Anggaran, Realisasi Kinerja, dan output fisik kegiatan. Aplikasi ini juga sudah terintegrasi dengan sistem kepegawaian dan pelaporan di Kabupaten Bogor.

Gambar 2.2 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



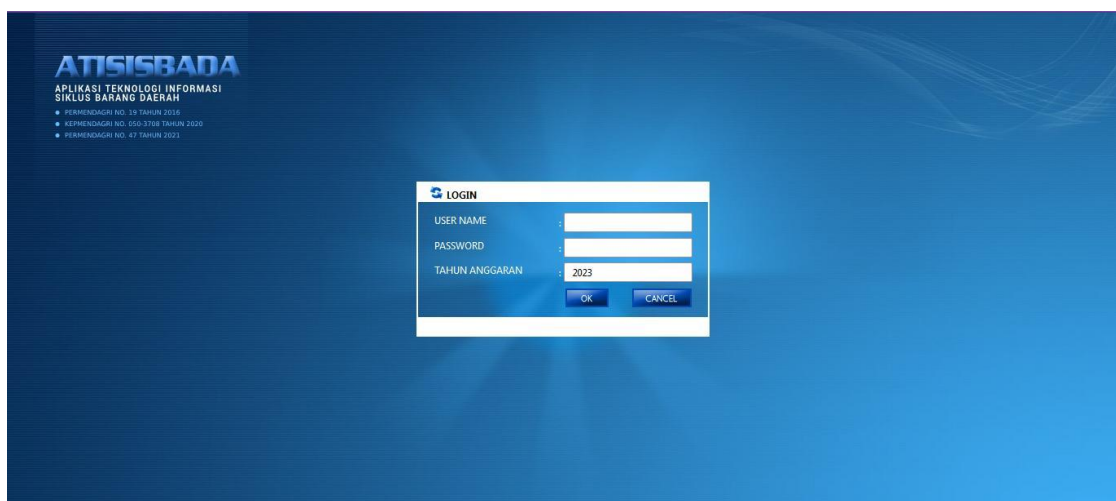
2. Instrumen pendukung penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang mengintegrasikan sistem informasi pembangunan daerah, sistem informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya.

Gambar 2.3 Sistem Informasi Pemerintah Daerah

<p>SIPD Perencanaan Penganggaran https://sipd-ri.kemendagri.go.id/</p>	<p>SIPD penatausahaan keuangan https://sipd.kemendagri.go.id/penatausahaan</p>
--	--

- Instrumen Penunjang Pengelolaan BMD di kabupaten Bogor adalah ATISISBADA (Aplikasi Teknologi Siklus Informasi Barang Daerah). Aplikasi ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang tertib atas pencatatan penerimaan belanja modal yang menjadi aset tetap oleh pengurus barang pada seluruh Indikator Keluaran dan hasil dan menciptakan pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan baik dengan melakukan inventarisasi pada KIB A (tanah) pada Perangkat Daerah masing-masing di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor agar dapat mengetahui kepastian lokasi tanah pemda.

Gamba 2.4. Aplikasi ATISISBADA



DATA AWAL

DATA AWAL | PELAKSANAAN | LAPORAN
DATA AWAL | CLOSING

DATA AWAL

Set Data Awal | Blangko LKI | LKI | Generate LKI | Cetak

URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 BIDANG : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
 SKPD : Dinas Sosial
 UNIT : Dinas Sosial
 SUB UNIT : Dinas Sosial

--KIB-- Kode Barang : Kode Barang Nama Barang : Nama Barang ID Barang : ID Bara NIBAR : NIBAR --Status Aset-- Tahun Perolehan : Gedung / Ruang Cari Clear
 --Kondisi--

JUMLAH DATA : 50 Kecamatan : --KECAMATAN-- Tahun Inventaris : 2022 Status Data Awal : --STATUS INVENTARIS-- Urutkan : --Urutkan--
 Tampilkan * Klik 'Tampilkan' untuk menampilkan barang

No.	Nomor	Spesifikasi Barang				Tahun Perolehan / Kondisi	Harga Perolehan	Keterangan	Status Data Awal
		Kode Barang/ ID Barang/ NIBAR	Reg	Nama/ Jenis Barang	Merki/ Type/ Lokasi				
1.	1.3.1.01.01.01.005/ 291/ 391	000004	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	Jl. Raya Merak Ds/Kel. Mekar Sari Kec. Pulo Merak Kota Cilegon Kel/Desa. Mektarsari Kec. Pulomerak	00010 31-12-1998	1998 / Baik	91.100.000,00		✖
2.	1.3.1.01.01.04.001/ 392/ 392	000001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Yusuf Martadilaga No. 58 Ds/Kel. Cipare Kec. Serang Kota Serang - Banten, Kel/Desa. Cipare Kec. Serang	00092 31-12-1998	1998 / Baik	307.100.000,00		✖

<https://bogor.atisisbada.id/>

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III BERISI:

- 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - 3.1.1 Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas
 - 3.1.2 Sasaran Strategis 2 Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi
- 3.2 Capaian Kinerja dan Keuangan
- 3.3 Realisasi Anggaran
 - 3.3.1. Analisis Efisiensi

Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Tahun 2025 dilakukan dengan cara mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, serta pemenuhan kesesuaian standar akuntabilitas pengelolaan keuangan BPKAD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025.

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengukuran capaian indikator kinerja BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2024, didasarkan pada ketentuan:

1. Angka maksimum capaian indikator kinerja BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2025 ditetapkan sebesar 100 %.
2. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase (%) capaian target indikator kinerja adalah:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja dari setiap sasaran strategis, menggunakan skala pengukuran sebagaimana tertera dalam Tabel berikut:

Tabel 3.1 Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progress Positif

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>100	Sangat Baik
2	85 s/d 100	Baik Sekali
3	70 s/d <85	Baik
4	55 s/d <70	Cukup
5	< 55	Kurang

Sumber: Diolah dari Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003

Tabel 3.2 Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progress Negatif

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>100	Kurang
2	85 s/d 100	Cukup
3	70 s/d <85	Baik
4	55 s/d <70	Baik Sekali
5	< 55	Sangat Baik

Sumber : Diolah dari Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003

Berdasarkan Renstra BPKAD Tahun 2025-2029, pada Tahun 2025 BPKAD Kabupaten Bogor menetapkan tujuan yaitu terwujudnya pengelolaan keuangan dan barang daerah yang akuntabel di Perangkat Daerah dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan baik secara kuantitatif maupun kualitatif menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis BPKAD yaitu : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas, dan Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib di Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran ini diukur melalui Indeks Kinerja Utama (IKU) dengan indikator sebagai berikut:

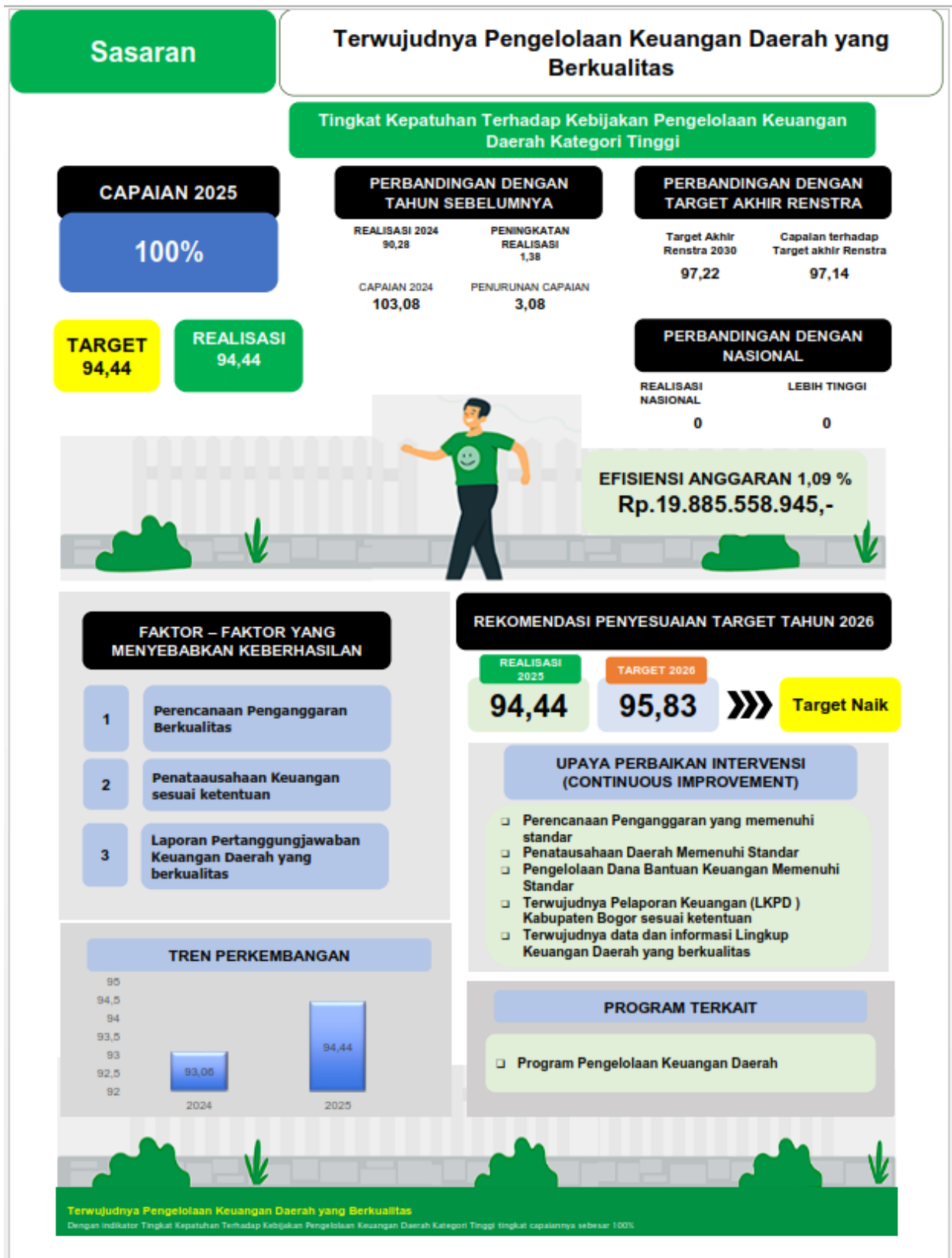
- a. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi
- b. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi

Table 3.3 Realisasi IKU BPKAD Tahun 2025

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	RUMUS	SATUAN	BASELINE 2024	TAHUN 2025		CAPAIAN (%)
					TARGET	REALISASI	
3	4	5	6	7	8	9	10
TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PD						
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil Evaluasi / Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WDP	WTP	WTP	100,00
SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PD (IKU)						
1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah dengan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangannya Daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100$	%	93,06	94,44	94,44	100,00
2. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah dengan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100$	%	86,11	90,28	90,28	100,00

3.1.1 Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas

SASARAN : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas
Indikator : Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi

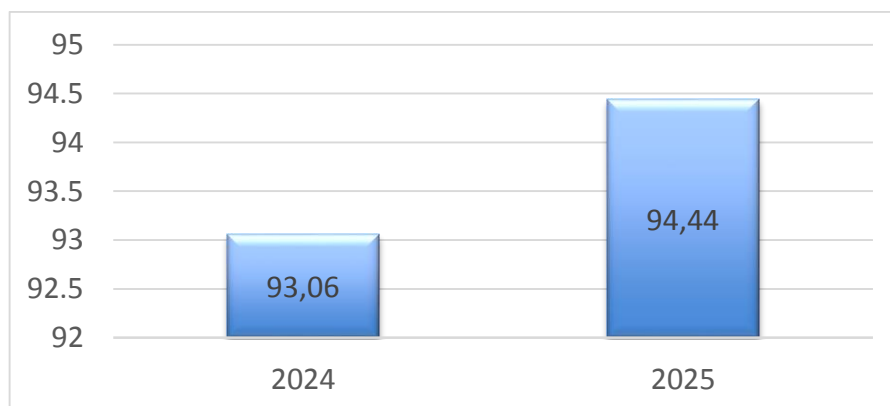


Gambar 3.1 Capaian dan Realisasi Sasaran Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas

Kabupaten Bogor berhasil mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas. Capaian kinerja Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi telah mencapai harapan yaitu sebesar 100% dengan target sebesar 94,44 % dan terealisasi sebesar 94,44%. Realisasi Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi sebesar 94.44 % artinya sebanyak 68 SKPD dari 72 SKPD memiliki tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dengan kategori tinggi di Kabupaten Bogor.

a. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari segi realisasi Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi meningkat sebesar 1,38 % dari Tahun 2024 sebesar 90,28% dan Tahun 2025 sebesar 94,44%. Namun dari segi pencapaian kinerja mengalami penurunan sebesar 3,08% yaitu dari capaian Tahun 2024 sebesar 103,08% sementara pada Tahun 2025 sebesar 100%.



Grafik 3.1 Perbandingan Realisasi Sasaran 1 tahun 2024 dan 2025

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, realisasi Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi Tahun 2025 ini tidak bisa dibandingkan karena berbeda indikator dari tahun 2020-2023.

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa Tahun Sebelumnya tidak dapat dibandingkan dikarenakan memiliki perbedaan Indikator, pada tahun sebelumnya memiliki indikator "**Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP**", sedangkan mulai tahun 2024 dan 2025 ini indikator

tersebut diganti dengan "**Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi**".

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

Dari aspek perencanaan jangka menengah, Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi Tahun 2025 sudah mencapai batas aman yaitu mencapai 97,14% yaitu dari target akhir RENSTRA sebesar 97,22% terealisasi sebesar 94,44%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Rata-Rata Nasional/Provinsi/Kabupaten

Pada tingkat nasional, realisasi Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi tidak bisa dianalisis karena indikator ini hanya digunakan di Kabupaten Bogor.

Indikator Kinerja Utama "**Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi**" Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan rata-rata nasional atau provinsi karena beberapa alasan berikut:

1. Perbedaan Karakteristik dan Kapasitas Fiskal Daerah

Setiap daerah memiliki struktur keuangan yang berbeda, termasuk sumber pendapatan, tingkat ketergantungan pada dana transfer pusat, dan kapasitas dalam mengelola anggaran. Hal ini membuat standar kepatuhan terhadap kebijakan keuangan daerah tidak selalu dapat dibandingkan secara langsung.

2. Variasi Implementasi Kebijakan di Setiap Daerah

Meskipun regulasi pengelolaan keuangan daerah bersifat nasional, penerapan di masing-masing daerah dapat berbeda tergantung pada kualitas tata kelola, kesiapan sistem, serta sumber daya manusia yang tersedia.

3. Perbedaan Mekanisme Evaluasi dan Pengukuran

- Beberapa daerah mungkin memiliki sistem audit dan pengawasan internal yang lebih ketat dibandingkan daerah lain.

Standar dan metode yang digunakan dalam mengukur kepatuhan bisa saja berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, sehingga hasilnya tidak selalu sebanding.

Walaupun tidak dapat dibandingkan dengan rata-rata nasional atau provinsi, capaian **100% dengan realisasi 94,44% dari target 94,44%** tetap menjadi indikator keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah, menunjukkan **kepatuhan yang tinggi, transparansi, serta efektivitas tata kelola keuangan yang optimal**.

e. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi antara lain Perencanaan Penganggaran Berkualitas, Penatausahaan Keuangan sesuai ketentuan, dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berkualitas.

1. Perencanaan Penganggaran Berkualitas dengan Ketepatan Penetapan RAPBD dan RAPBD Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sesuai Peraturan Perundang-Undangan sebesar 100%. Perencanaan penganggaran yang berkualitas sendiri didukung oleh perencanaan penganggaran yang memenuhi standar sebesar 100%.

Upaya untuk meningkatkan Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi yang diintervensi Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada lingkup Bidang Anggaran yaitu

- Penyusunan KUA dan PPAS,
- Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS,
- Pemverifikasian RKA SKPD
- Pemverifikasian Perubahan RKA SKPD
- Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan Hasil Rakor sebagai Bahan Pembahasan Kebijakan Anggaran
- Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Belanja Daerah Hasil Rakor sebagai Bahan Pembahasan Kebijakan Anggaran
- Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Pembiayaan Hasil Rakor sebagai Bahan Pembahasan Kebijakan Anggaran

2. Penatausahaan Keuangan sesuai ketentuan dengan Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Penerbitan SP2D sesuai ketentuan sebesar 100%. Penatausahaan Keuangan sesuai ketentuan sendiri didukung oleh Penatausahaan Daerah Memenuhi Standar dan Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Memenuhi Standar.

Upaya untuk meningkatkan Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi yang diintervensi Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada lingkup Bidang Perbendaharaan yaitu:

- Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
- Review Anggaran Kas dan SPD disahkan
- Penerbitan Laporan Pembiayaan Daerah
- Penyusunan Laporan Dana perimbangan dan dana transfer lainnya terdistribusi kedalam APBD
- Penyusunan Laporan Pengelolaan Gaji dan Tunjangan
- Pemverifikasian Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Perangkat Daerah
- Penyusunan Petunjuk Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah
- Pembinaan ASN tentang Penatausahaan Keuangan Daerah
- Review Usulan Pencairan Bantuan Keuangan
- Review usulan pencairan dana darurat dan mendesak
- Review usulan pencairan dana bagi hasil Kabupaten

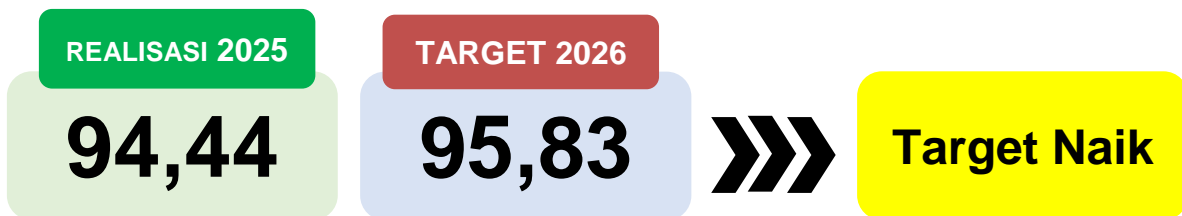
3. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berkualitas dengan Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang sesuai ketentuan sebesar 100%. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berkualitas sendiri didukung oleh Pelaporan Keuangan (LKPD) Kabupaten Bogor sesuai ketentuan dan data dan informasi Lingkup Keuangan Daerah yang berkualitas.

Upaya untuk meningkatkan Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi yang diintervensi Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada lingkup Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi yaitu:

- Penyusunan laporan keuangan yang memenuhi standar
- Penyusunan Laporan keuangan daerah secara berkala
- Pengonsolidasian Laporan Keuangan SKPD dan BUD
- Penyediaan Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan APBD
- Penyusunan Tanggapan hasil pemeriksaan BPK
- Penyusunan Laporan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
- Penyusunan Kebijakan Akuntansi Daerah
- Pembinaan ASN tentang Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- Penginventarisasian dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah

- Pengimplementasian dan pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
- Pembinaan ASN tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

f. Rekomendasi Penyesuaian Target IKU Tahun 2025



Gambar 3.2 Penyesuaian Target Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi

Berdasarkan gambar di atas, upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi meliputi:

1. Meningkatkan Standar Kinerja
 - o Dengan menaikkan target, pemerintah daerah lebih terdorong untuk menjaga dan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan keuangan daerah.
2. Konsistensi dengan Tren Peningkatan
 - o Tren capaian menunjukkan perbaikan, sehingga target yang lebih tinggi lebih realistis dibanding mempertahankan angka di bawah realisasi sebelumnya.
3. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi
 - o Target yang lebih tinggi akan memotivasi peningkatan pengawasan, pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap regulasi.
4. Optimalisasi Sistem dan Teknologi Informasi

g. Capaian Kinerja dan Keuangan

Pada Sasaran 1 **Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas**, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu: **Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi** yang pencapaiannya didukung oleh **Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

Berikut Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangannya:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangannya (Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2025	
		K	S	Rp.	K	Rp
2	3	4			5	
BIDANG URUSAN : KEUANGAN						
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						
SASARAN: Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi					
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			100	1.828.929.206.311	100,00	1.809.043.647.366
	Ketepatan Penetapan RAPBD dan RAPBD Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Tepat /Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	6.498.014.428	Tepat Waktu	6.005.128.389
	Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Penerbitan SP2D tepat waktu	Persen	100	1.820.469.591.847	100	2.311.073.039
	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang sesuai ketentuan	Persen	100	1.961.600.036	100	1.829.954.001
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran Anggaran Keuangan Daerah yang sesuai standar	100,00	%	7.476.051.521,00	97,54	7.113.892.872,34
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	Dokumen	570.382.127	2	532.713.820
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	Dokumen	501.499.900	2	462.679.061
Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	72	Dokumen	103.872.435	72	101.875.155
Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	72	Dokumen	122.889.955	72	118.028.400
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala	2	Dokumen	1.581.042.472	2	1.488.228.283

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2025	
		K	S	Rp.	K	Rp
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Daerah tentang Penjabaran APBD					
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	Dokumen	2.040.045.528	2	1.946.694.092
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	70	Dokumen	862.125.518	70	778.807.146
Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1	Dokumen	137.211.114	1	131.120.201
Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1	Dokumen	274.449.808	1	215.475.533
Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1	Dokumen	304.495.571	1	229.506.698
Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah yang sesuai ketentuan	100,00	%	1.494.431.425	100	1.254.381.767
Sub Kegiatan Kooordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12	Dokumen	333.769.674	12	288.115.811
Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	5	Dokumen	59.514.776	5	50.707.400
Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1	Dokumen	188.937.592	1	183.673.053
Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5	Dokumen	237.743.047	5	225.601.900
Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2	Dokumen	111.570.503	2	109.498.504

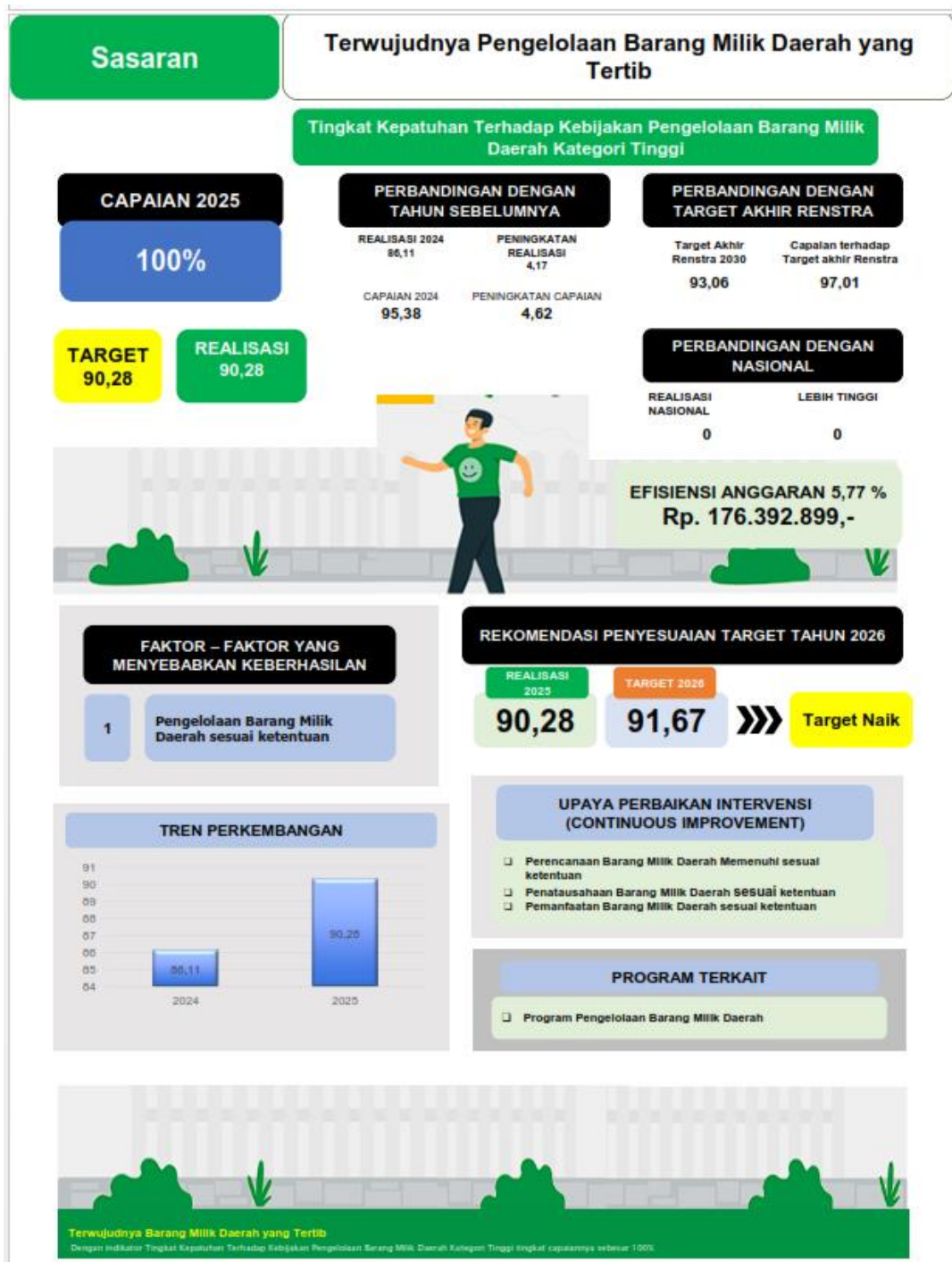
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2025	
		K	S	Rp.	K	Rp
Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1	Dokumen	312.907.630	1	243.093.599
Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	228	Orang	249.988.203	228	153.691.500
Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang memenuhi standar	100,00	%	1.117.689.398	100	1.056.691.272
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1	Laporan	211.044.207	1	205.552.492
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	19	Laporan	280.233.301	19	242.271.058
Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1	Laporan	80.864.348	1	76.086.654
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	Dokumen	163.815.574	2	162.549.857
Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	Dokumen	80.569.170	1	75.925.693
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan	12	Dokumen	61.919.529	12	57.999.999

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2025	
		K	S	Rp.	K	Rp
	Tuntutan Kerugian Daerah					
Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi	1	Dokumen Raperbup	154.738.534	1	153.159.269
Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	130	Orang	84.504.735	130	83.146.250
Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penerbitan SP2D Bantuan Keuangan yang tepat waktu	100,00	%	1.818.975.160.422	100	1.799.954.183.209
Sub Kegiatan Analisa Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1	Laporan	1.445.918.607.968	1	1.436.664.284.859
Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Menedesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Menedesak	1	Laporan	93.247.135.678	1	83.480.481.684
Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1	Laporan	279.809.416.776	1	279.809.416.666
Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase data dan informasi yang akurat dan mutakhir	100,00	%	843.910.638	100	773.262.729
Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1	Dokumen	61.265.749	1	58.790.254
Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1	Dokumen	480.098.704	1	458.704.366
Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	240	Orang	302.546.185	240	255.768.109

Dokumen pelaksanaan optimalisasi kegiatan Pengelolaan keuangan yang terkait dengan IKU “Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi” terkait evaluasi Kinerja, Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan terlampir.

3.1.2 Sasaran Strategis Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Berkualitas

SASARAN : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Berkualitas
Indikator : Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi

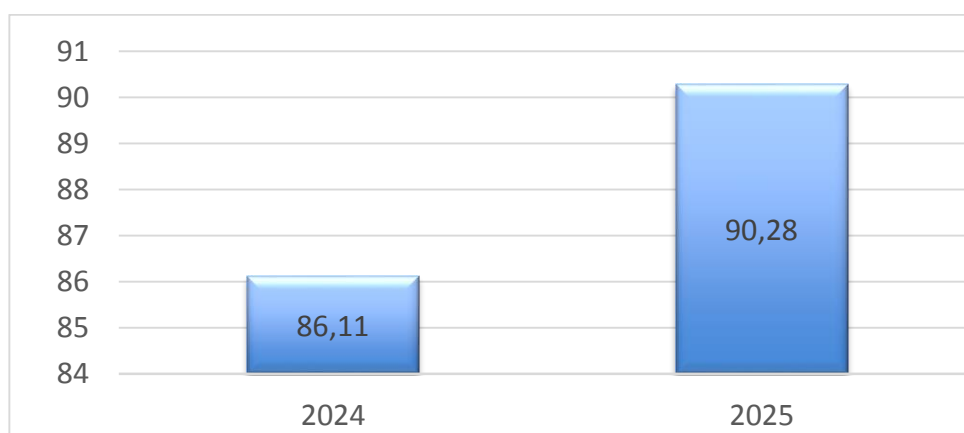


Gambar 3.3 Capaian 2024 Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi

Kabupaten Bogor berhasil mewujudkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Berkualitas. Capaian kinerja Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi telah mencapai harapan yaitu sebesar 100% dengan target sebesar 90,28 % dan terealisasi sebesar 90,28%. Realisasi Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi sebesar 90.28 % artinya sebanyak 65 SKPD dari 72 SKPD memiliki tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan barang milik daerah dengan kategori tinggi di Kabupaten Bogor.

a. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari segi realisasi Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi meningkat sebesar 4,17 % dari Tahun 2024 sebesar 86,11% dan Tahun 2025 sebesar 90,28%. Begitu juga dari segi pencapaian kinerja mengalami peningkatan sebesar 4,62% yaitu dari capaian Tahun 2024 sebesar 95,38% sementara pada Tahun 2025 sebesar 100%.



Grafik 3.2 Perbandingan Realisasi Sasaran 2 tahun 2024 dan 2025

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, realisasi Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya tidak dapat dibandingkan dikarenakan memiliki perbedaan Indikator, pada tahun sebelumnya

- ✦ Indikator lama ("Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD yang Baik") lebih berorientasi pada jumlah OPD yang mampu mengelola BMD dengan

baik, tetapi tidak mengukur kepatuhan terhadap regulasi secara menyeluruh. ✦ Indikator baru ("Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan BMD Kategori Tinggi") lebih fokus pada kepatuhan perangkat daerah terhadap kebijakan dan aturan yang berlaku, mencerminkan sejauh mana regulasi ditaati.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

Dari aspek perencanaan jangka menengah, Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi Tahun 2025 sudah mencapai batas aman yaitu mencapai 97,14% yaitu dari target akhir RENSTRA sebesar 97,01% terealisasi sebesar 90,28%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Rata-Rata Nasional/Provinsi/Kabupaten

Pada tingkat nasional, realisasi Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi tidak bisa dianalisis karena indikator ini hanya digunakan di Kabupaten Bogor.

Indikator Kinerja Utama "**Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi**" Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan rata-rata nasional atau provinsi dikarenakan memiliki karena beberapa alasan berikut:

1. Perbedaan Indikator dan Kriteria: Setiap daerah mungkin menggunakan indikator atau kriteria yang berbeda dalam mengukur tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
2. Regulasi dan Kebijakan yang Berbeda: Setiap daerah memiliki kebijakan dan regulasi pengelolaan barang milik daerah yang bisa bervariasi, tergantung pada peraturan daerah masing-masing.
3. Metodologi Pengukuran yang Berbeda: Daerah dapat menggunakan metode yang berbeda dalam mengukur dan melaporkan tingkat kepatuhan, sehingga data yang dihasilkan tidak dapat dibandingkan secara langsung.
4. Faktor Sumber Daya dan Infrastruktur: Sumber daya dan kapasitas daerah dalam menerapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah dapat mempengaruhi hasil pengukuran kepatuhan yang berbeda antara daerah satu dengan lainnya.

5. Tahapan Implementasi yang Berbeda: Beberapa daerah mungkin masih dalam tahap awal penerapan kebijakan pengelolaan barang milik daerah, sementara daerah lain sudah lebih maju dalam implementasinya.

Walaupun tidak dapat dibandingkan dengan rata-rata nasional atau provinsi, capaian 100% dengan realisasi 90,28% dari target 90,28% tetap menjadi indikator keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah, menunjukkan kepatuhan yang tinggi, transparansi, serta efektivitas tata kelola Barang Milik Daerah yang optimal.

e. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi adalah Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan

Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan dengan Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan sebesar 100%. Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan didukung oleh Perencanaan Barang Milik Daerah Memenuhi sesuai ketentuan, Penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan, dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan.

1. Perencanaan Barang Milik Daerah Memenuhi sesuai ketentuan sendiri didukung oleh Persentase Dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah yang sesuai ketentuan sebesar 100%.

Upaya untuk meningkatkan Perencanaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan yang diintervensi Program Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu:

- Penyusunan dan Pemverifikasian Standar Harga
- Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
- Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)
- Penilaian Barang Milik Daerah

2. Penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan sendiri didukung oleh Persentase Barang Milik Daerah yang Penatausahaannya sesuai ketentuan sebesar 100%.

Upaya untuk meningkatkan Penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan yang diintervensi Program Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu:

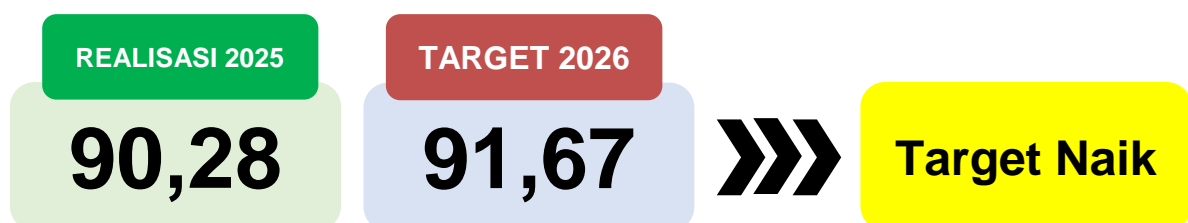
- Pencatatan Barang Milik Daerah sebagai aset daerah
- Penginventarisasian Barang Milik Daerah
- Pemverifikasian Data Barang Milik Daerah
- Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- Pembinaan ASN dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah

3. Pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan sendiri didukung oleh Persentase dokumen pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan sebesar 100%.

Upaya untuk meningkatkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan yang diintervensi Program Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu:

- Penyusunan Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah
- Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Pembuatan Sertifikat Barang Milik Daerah

f. Rekomendasi Penyesuaian Target IKU Tahun 2025



Gambar 3.4 Rekomendasi Penyesuaian Target IKU Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi Tahun 2025

Berdasarkan gambar di atas, upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi meliputi :

1. Peningkatan Kepatuhan terhadap Regulasi

- o Memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan Barang Milik Daerah.
- o Meningkatkan sosialisasi regulasi kepada seluruh perangkat daerah.

2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Lebih Efektif

- o Menyusun jadwal pemeliharaan yang lebih terstruktur dan memastikan pencatatan yang lebih akurat.

- o Meningkatkan ketepatan penyampaian laporan BMD secara rutin dan tepat waktu.

3. Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM

- o Mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis terkait pengelolaan aset daerah.
- o Menguatkan komitmen pengguna dan pengelola barang dalam merencanakan kebutuhan aset sesuai regulasi.

4. Optimalisasi Sistem Pengelolaan Aset Berbasis Teknologi

- o Meningkatkan penggunaan sistem manajemen aset yang lebih modern dan berbasis digital.
- o Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap implementasi sistem pengelolaan BMD yang sudah ada.

5. Pengawasan dan Evaluasi yang Lebih Ketat

- o Melakukan audit berkala dengan mekanisme *reward and punishment* untuk meningkatkan kepatuhan.
- o Mengoptimalkan peran pengawasan internal dalam memastikan pengelolaan BMD sesuai ketentuan.

g. Capaian Kinerja dan Keuangan

Pada Sasaran 2 **Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Berkualitas**, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi yang pencapaiannya didukung oleh **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Tabel 3.2 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangannya Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Berkualitas

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2025	
		K	S	Rp.	K	Rp
2	3	4			5	
BIDANG URUSAN : KEUANGAN						
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						
SASARAN: Terwujudnya Pengelolaan Barang	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2025	
		K	S	Rp.	K	Rp
Milik Daerah yang Berkualitas	Milik Daerah Kategori Tinggi					
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		100,00	%	3.056.605.046	100	2.880.212.147
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah						
	Persentase Dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah yang sesuai ketentuan	100	%	909.790.347	100	889.081.459
	Persentase Barang Milik Daerah yang Penatausahaanya tepat waktu	100	%	859.868.879	100	790.183.976
	Persentase dokumen pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan	100	%	1.286.945.820	100	1.200.946.712
Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2	Dokumen	240.954.459	2	237.292.974
Sub Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	105.932.046	1	103.819.667
Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	Dokumen	219.421.115	2	215.430.668
Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	219.989.928	1	213.809.440
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	Laporan	252.482.319	1	214.406.513
Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1	Laporan	77.191.156	1	73.215.338
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1	Laporan	509.830.367	1	499.007.268
Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1	Laporan	343.482.727	1	332.538.150

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2025	
		K	S	Rp.	K	Rp
Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Laporan	340.312.912	1	277.511.336
Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2	Dokumen	216.812.613	2	210.618.668
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1	Laporan	116.870.178	1	113.095.000
Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2	Laporan	217.421.594	2	210.218.025
Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	76	Orang	195.903.632	76	179.249.100

3.2 Inovasi yang mendukung pencapaian kinerja



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor dengan bangga memperkenalkan inovasi terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu SPEED Y.E.S (Surat Pencairan Elektronik Digital Yakin Enggal Salur). Inovasi ini dirancang untuk mempercepat proses pencairan dana dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening tujuan, baik untuk perangkat daerah maupun pihak ketiga, dengan pendekatan digital yang transparan, efisien, dan akuntabel.

SPEED Y.E.S merupakan sistem berbasis elektronik yang mengintegrasikan proses pengajuan, verifikasi, dan pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara real-time. Dengan memanfaatkan teknologi Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan integrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIPD), SPEED Y.E.S memungkinkan proses pencairan dana dilakukan

lebih cepat, akurat, dan tanpa kebutuhan input data ganda, sehingga mengurangi risiko kesalahan administrasi.

Kepala BPKAD Kabupaten Bogor, Mely Kamelia SH, MP menyatakan, "SPEED Y.E.S adalah wujud komitmen kami untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang modern dan responsif. Dengan sistem ini, kami berharap dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik serta mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Bogor."

Inovasi ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta mendukung upaya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang dicanangkan pemerintah. SPEED Y.E.S juga menjadi bagian dari langkah strategis Kabupaten Bogor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan keuangan yang lebih efektif.

BPKAD Kabupaten Bogor telah melakukan sosialisasi kepada seluruh perangkat daerah dan mitra terkait untuk memastikan implementasi SPEED Y.E.S berjalan lancar. Pelatihan intensif juga diberikan kepada pengelola keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem ini.

Dengan peluncuran SPEED Y.E.S, Kabupaten Bogor optimis dapat menjadi salah satu daerah percontohan dalam transformasi digital pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, sekaligus memberikan dampak positif bagi pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah.



Gambar 3.5 SPEED Y.E.S Juara 1 Lomba Inovasi Government Award Lingkup Kab. Bogor

Sebagai evidence dari inovasi yang mendukung pencapaian Kinerja, Dokumen SPEED YES terlampir.

3.3 Kolaborasi lintas sektor

Dalam melaksanakan program dan kegiatan BPKAD melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait diantaranya:

Pada program pengelolaan keuangan daerah, untuk melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen penganggaran, pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan Keuangan serta pengelolaan Aset, BPKAD melibatkan SKPD lain diantaranya:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) terkait Perencanaan Anggaran
2. Inspektorat, terkait Review RKA, DPA, RENSTRA, RENJA
3. Sekretariat Dewan, terkait Pembahasan KUA PPAS, RAPBD
4. Sekretariat Daerah (Administrasi Pembangunan, Bagian Organisasi) terkait Regulasi Pemerintahan Daerah dan Evaluasi Kinerja.
5. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terkait Pendapatan Daerah.
6. Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) terkait Data Kepegawaian (Gaji dan Tunjangan Pegawai)
7. Bank Jabar dan Bank BRI dalam hal pengelolaan kas daerah
8. BUMD dalam hal pencapaian target deviden
9. BPKAD Provinsi Jawa Barat terkait evaluasi Gubernur terhadap RAPBD, Bantuan Keuangan provinsi dan Arah Kebijakan Provinsi

3.4 Realisasi Anggaran

3.4.1 Realisasi Anggaran Menurut Sasaran BPKAD

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Menurut Sasaran BPKAD

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	1.828.929.206.311,00	1.809.043.647.366	98,91
2	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	3.056.605.046,00	2.880.212.147,00	94,23

3.4.2 Realisasi Anggaran Menurut PROGRAM BPKAD

Tabel 3.4 Realisasi Anggaran Menurut Sasaran PROGRAM BPKAD

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase
1	2	3		4
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.828.929.206.311,00	1.774.435.848.317,00	97,02
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.056.605.046,00	2.880.212.147,00	94,23
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.119.442.455,00	39.057.721.240,00	86,57



3.4.3 Realisasi Anggaran Belanja BPKAD

Tabel 3.4 REALISASI ANGGARAN BELANJA BPKAD TAHUN 2018-2025

Uraian	2018 Audited			2019 Audited			2020 Audited			2021 Audited			2022 Audited		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Operasi	45,62	42,35	92,84	43,06	41,24	95,76	49,28	44,21	89,71	39,25	37,75	96,17	47,37	42,71	90,15
Belanja Pegawai	28,78	27,84	96,73	28,05	27,54	98,19	29,63	27,39	92,46	22,26	22,03	99,00	28,04	25,47	90,84
Belanja Barang Dan Jasa	16,84	14,51	86,18	15,02	13,70	91,22	19,65	16,82	85,57	17,00	15,71	92,46	19,34	17,24	89,16
Belanja Modal	1.432	1.412	98,60	2.200	2.117	96,22	7.892	6.718	85,12	1.080	1.005	93,06	1.550	1.261	81,35
Belanja Peralatan Dan Mesin	1.432	1.412	98,60	2.005	1.926	96,06	7.510	6.350	84,55	846	773	91,37	1.007	900	89,37
Belanja Gedung Dan Bangunan	0	0	0,00	184	180	97,83	367	355	96,73	14,0	14,0	100,00	318	312	98,11
Belanja Jalan Irigasi Dan Jaringan	0	0	0,00	10,8	10,7	99,07	15	13	86,67	0	0	0,00	0	0	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	220	218	99,09	225	49	21,78
Belanja Aset Lainnya	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

Uraian	2018 Audited			2019 Audited			2020 Audited			2021 Audited			2022 Audited		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Terduga	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	90.785	75.948	83,66	59.532	30.229	50,78
Belanja Transfer	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1.417.714	1.409.487	99,42	1.532.325	1.523.675	99,44
Belanja Bagi Hasil Pajak Ke Desa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	166.155	166.155	100	222.435	222.278	99,93
Belanja Transfer Bantuan Keuangan	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1.251.559	1.243.332	99,34	1.309.890	1.301.397	99,35
Total Belanja Daerah	1.478	1.454	98,43	2.243	2.158	96,21	7.941	6.762	85,15	1.509.618	1.486.478	98,47	1.593.454	1.555.208	97,60

Uraian	2023 Audited			2024 Audited			2025 An-Audited		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Operasi	55.631	43.530	78,25	54.303,00	51.180,00	94,23	53.615,00	46.677,00	87,06
Belanja Pegawai	33.573	23.978	96,73	27.743,00	26.764,00	96,47	30.454,00	26.227,00	86,12
Belanja Barang Dan Jasa	22.058	19.552	86,18	26.560,00	24.416,00	91,88	23.160,44	20.449,89	88,29
Belanja Modal	4.159	4.022	96,71	9.655	9.307	96,4	9.655	9.307	96,4
Belanja Peralatan Dan Mesin	3.827	3.691	96,45	9.067,00	8.727,00	96,25	3.812,00	3.662,00	96,05
Belanja Gedung Dan Bangunan	221	220	0	302	294	97,35	702	689	97,86
Belanja Jalan Irigasi Dan Jaringan	-	-	0	-	-	0	-	-	0
Belanja Aset Tetap Lainnya	111	111	0	0	0	0	0	0	0
Belanja Aset Lainnya	-	-	0	286	286	100	-	-	0
Belanja Tidak Terduga	53.099	52.261	98,42	34.889,00	32.872,00	94,22	93.247,00	83.480,00	89,52
Belanja Tidak Terduga	53.099	52.261	0	34.889,00	32.872,00	0	93.247,00	83.480,00	89,52
Belanja Transfer	1.623.475	1.602.333	0	1.662.136,00	1.653.448,00	99,48	1.725.728,00	1.716.473,00	99,46
Belanja Bagi Hasil Pajak Ke Desa	227.553	227.375	0	249.966,00	248.983,00	99,61	279.809,00	279.809,00	99,99
Belanja Transfer Bantuan Keuangan	1.395.922	1.374.958	0	1.412.170,00	1.404.465,00	99,45	1.445.918,00	1.436.664,00	99,35
Total Belanja Daerah	1.736.364	1.702.146	98,03	1.760.983	1.746.795	99,19	1.877.105.	1.850.981	98,6

Realisasi Anggaran dalam 000.000

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2018-2024

3.4.4 Realisasi Anggaran Pendapatan BPKAD

Tabel 3.5 REALISASI PENDAPATAN BPKAD TAHUN 2018-2025

Uraian	2018 Audited			2019 Audited			2020 Audited			2021 Audited			2022 Audited		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Daerah															
Pendapatan Asli Daerah	1,870	1,942	103.85	2,112	4,582	216.95	2,660	4,270	160.53	354,747	130,388	36.76	402,263	158,233	39.34
Hasil Retribusi Daerah	1,137	1,579	138.87	1,379	4,050	293.69	1,677	2,569	153.19	2,633	2,699	102.51	2,734	3,377	123.52
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	64,272	71,304	0,00	74,195	75,860	102.24
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	733	363	49.52	733	532	0,00	983	1701	0,00	287,842	56,385	0,00	325,334	78,996	24.28
Pendapatan Transfer	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	4,813,212	4,729,476	98.26	5,430,95₅	5,282,559	97.27
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	3,083,609	3,065,553	99.41	3,745,851	3,601,509	96.15
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	598,660	598,314	99.94	568,915	568,003	99.84
Transfer Pemerintah Provinsi	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1,130,943	1,065,609	94.22	1,116,189	1,113,047	99.72
Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	627,338	633,235	100.94	5,623	10,708	190.43

Uraian	2018 Audited			2019 Audited			2020 Audited			2021 Audited			2022 Audited		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Hibah	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	30,230	36,127	119.51	5,623	10,708	190.43
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	597,108	597,108	100.00	0	0	0,00
Total Pendapatan Daerah	1,870	1,942	103.85	2,112	4,582	216.95	2,660	4,270	160.53	5,795,297	5,493,099	94.79	5,838,841	5,451,500	93.37

raian	2023 Audited			2024 Audited			2025 An-Audited		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Daerah									
Pendapatan Asli Daerah	356,406	128,406	36.03	301,951	163,525	54,15	587.628	166.173	28,27
Hasil Retribusi Daerah	2,734	2,917	106.73	2,519	3,634	144,29	2.517	3.901	154,97
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	76,280	74,682	97.91	77,599	79,014	101,82	78.467	79.190	100,92
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	277,392	50,807	18.32	221,833	80,876	36,45	506.644	83.081	16,39
Pendapatan Transfer	5,830,275	5,691,855	97.63	6,349,050	6,240,272	98,28	6.339.314	6.160.093	97,17
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4,581,602	4,501,826	98.26	5,108,720	5,046,513	98,78	5.697.758	5.529.578	97,04
Pendapatan Transfer Antar Daerah	1,248,673	1,190,029	95.30	1,240,329	1,193,759	96,24	641.555	630.514	98,27
Lain-lain Pendapatan yang Sah	12,950	13,988	108.02	0	9,737	0,00	6.659	13.187	198,03
Pendapatan Hibah	12,950	13,988	108.02	0	9,737	0,00	6.659	13.187	198,03
Total Pendapatan Daerah	6,199,632	5,834,382	94.11	6,651,001	6,413,535	96,42	6.933.602	6.339.453	91,43

Realisasi Anggaran dalam 000.000

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2018

Anggaran Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.877.105.253.813,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.816.373.781.704,00 atau sebesar 98,61% dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp 53.615.244.218,75 terealisasi sebesar Rp 46.677.791.463,00 atau terserap sebesar 87,06%.
2. Anggaran Belanja Modal sebesar Rp 4.514.849.172,25 terealisasi sebesar Rp 4.349.570.482,00 atau terserap sebesar 96,33%.
3. Anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 93.247.135.678,00 terealisasi sebesar Rp 83.480.481.684,00 atau terserap sebesar 89,52%.
4. Anggaran Belanja Transfer sebesar Rp 1.725.728.024.744,00 terealisasi sebesar Rp 1.681.865.938.075,00. atau terserap sebesar 99,46%.

Berdasarkan hasil dari Pengukuran Kinerja Kegiatan dapat dilakukan evaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan akuntabilitas kinerja seperti tersebut diatas, dan target dan realisasi dari anggaran dapat tercapai, seperti pada Tabel berikut :

Tabel 3.6 Tabel Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2025

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
		K	S	Rp.	K	Rp	K	Rp
1	2	3			4			
URUSAN : PENUNJANG								
BIDANG URUSAN : KEUANGAN								
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH								
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan Penetapan RAPBD dan RAPBD Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Tepat /Tidak Tepat Waktu	Tepat /Tidak Tepat Waktu	6.498.014.428	100,00	6.005.128.389	100,00	
	Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Penerbitan SP2D tepat waktu	Persen	%	1.820.469.591.847	99,00	2.311.073.039	100,00	
	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang sesuai ketentuan	Persen	%	1.961.600.036	100,00	1.829.954.001	100,00	
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran Anggaran Keuangan Daerah yang sesuai standar	100,00	%	6.498.014.428	100	6.005.128.389	100,00	92,41
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	Dokumen	570.382.127	2	532.713.820	100,00	93,40
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	Dokumen	501.499.900	2	462.679.061	100,00	92,26

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
		K	S	Rp.	K	Rp	K	Rp
Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	72	Dokumen	103.872.435	72	101.875.155	100,00	98,08
Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	72	Dokumen	122.889.955	72	118.028.400	100,00	96,04
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	Dokumen	1.581.042.472	2	1.488.228.283	100,00	94,13
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	Dokumen	2.040.045.528	2	1.946.694.092	100,00	95,42
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	70	Dokumen	862.125.518	70	778.807.146	100,00	90,34
Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1	Dokumen	137.211.114	1	131.120.201	100,00	95,56
Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1	Dokumen	274.449.808	1	215.475.533	100,00	78,51
Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1	Dokumen	304.495.571	1	229.506.698	100,00	75,37
Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah yang sesuai ketentuan	100,00	%	1.494.431.425	100	1.254.381.767	100,00	83,94

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
		K	S	Rp.	K	Rp	K	Rp
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12	Dokumen	333.769.674	12	288.115.811	100,00	86,32
Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	5	Dokumen	59.514.776	5	50.707.400	100,00	85,20
Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1	Dokumen	188.937.592	1	183.673.053	100,00	97,21
Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5	Dokumen	237.743.047	5	225.601.900	100,00	94,89
Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2	Dokumen	111.570.503	2	109.498.504	100,00	98,14
Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1	Dokumen	312.907.630	1	243.093.599	100,00	77,69
Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	228	Orang	249.988.203	228	153.691.500	100,00	61,48

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
		K	S	Rp.	K	Rp	K	Rp
Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang memenuhi standar	100,00	%	1.117.689.398	100	1.056.691.272	100,00	94,54
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1	Laporan	211.044.207	1	205.552.492	100,00	97,40
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	19	Laporan	280.233.301	19	242.271.058	100,00	86,45
Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1	Laporan	80.864.348	1	76.086.654	100,00	94,09
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	Dokumen	163.815.574	2	162.549.857	100,00	99,23
Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	Dokumen	80.569.170	1	75.925.693	100,00	94,24
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	12	Dokumen	61.919.529	12	57.999.999	100,00	93,67

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
		K	S	Rp.	K	Rp	K	Rp
Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi	1	Dokumen Raperbup	154.738.534	1	153.159.269	100,00	98,98
Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	130	Orang	84.504.735	130	83.146.250	100,00	98,39
Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran Bantuan Keuangan yang tepat waktu	100,00	%	1.818.975.160.422	100	1.799.954.183.209	100,00	98,95
Sub Kegiatan Analisa Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1	Laporan	1.445.918.607.968	1	1.436.664.284.859	100,00	99,36
Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	Laporan	93.247.135.678	1	83.480.481.684	100,00	89,53
Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1	Laporan	279.809.416.776	1	279.809.416.666	100,00	100,00
Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase data dan informasi yang akurat dan mutakhir	100,00	%	843.910.638	100	773.262.729	100,00	91,63
Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1	Dokumen	61.265.749	1	58.790.254	100,00	95,96
Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1	Dokumen	480.098.704	1	458.704.366	100,00	95,54

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
		K	S	Rp.	K	Rp	K	Rp
Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	72	Orang	302.546.185	240	255.768.109	100,00	84,54
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Barang Milik Daerah dengan Baik	100	%	3.056.605.046	100	2.880.212.147	100,00	94,23
	Persentase Dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah yang sesuai ketentuan	100	%	909.790.347	100	889.081.459	100,00	97,72
	Persentase Barang Milik Daerah yang Penatausahaanya tepat waktu	100	%	859.868.879	100	790.183.976	100,00	91,90
	Persentase dokumen pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan	100	%	1.286.945.820	100	1.200.946.712	100,00	93,32
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Penatausahaanya tepat waktu	100	%	3.056.605.046	100	2.880.212.147	100,00	94,23
Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2	Dokumen	240.954.459	2	237.292.974	100,00	98,48
Sub Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	105.932.046	1	103.819.667	100,00	98,01
Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	Dokumen	219.421.115	2	215.430.668	100,00	98,18
Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	219.989.928	1	213.809.440	100,00	97,19

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
		K	S	Rp.	K	Rp	K	Rp
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	Laporan	252.482.319	1	214.406.513	100,00	84,92
Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1	Laporan	77.191.156	1	73.215.338	100,00	94,85
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1	Laporan	509.830.367	1	499.007.268	100,00	97,88
Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1	Laporan	343.482.727	1	332.538.150	100,00	96,81
Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Laporan	340.312.912	1	277.511.336	100,00	81,55
Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2	Dokumen	216.812.613	2	210.618.668	100,00	97,14
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1	Laporan	116.870.178	1	113.095.000	100,00	96,77
Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2	Laporan	217.421.594	2	210.218.025	100,00	96,69
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai SAKIP BPKAD	BB	Kategori	45.119.442.456	77,50	39.057.721.240	100,00	86,57

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
		K	S	Rp.	K	Rp	K	Rp
Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja lingkup BPKAD yang berkualitas	100,00	%	814.938.716,00	100,00	794.627.014,00	100,00	97,51
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	96.470.136	4	92.845.334	100,00	96,24
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	40.129.564	2	37.831.500	100,00	94,27
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	40.523.712	2	38.678.499	100,00	95,45
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Laporan	143.716.703	6	137.870.668	100,00	95,93
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	17	Laporan	301.316.908	17	277.726.000	100,00	92,17
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	30.806.133	1	29.723.014	100,00	96,48
Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	100,00	%	30.862.022.810	100	26.611.988.631	100,00	86,23
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87	Orang/ Bulan	30.454.806.861	87	26.227.929.442	100,00	86,12

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
		K	S	Rp.	K	Rp	K	Rp
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	79.742.973	1	77.510.195	100,00	97,20
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dokumen	37.751.823	1	36.685.392	100,00	97,18
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	46.810.395	2	44.928.308	100,00	95,98
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24	Laporan	210.581.498	24	193.243.533	100,00	91,77
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dokumen	32.329.260	2	31.691.761	100,00	98,03
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase aset yang tercatat lingkup BPKAD	100,00	%	124.110.771	100	115.085.500	100,00	92,73
Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	16.698.573	2	16.322.000	100,00	97,74
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	92.099.154	1	83.841.000	100,00	91,03
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	15.313.044	1	14.922.500	100,00	97,45
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	100,00	%	184.917.875	100	168.477.000	100,00	91,11
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	25.396.551	1	24.760.000	100,00	97,49

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
		K	S	Rp.	K	Rp	K	Rp
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	19.659.276	1	18.780.000	100,00	95,53
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	20.387.048	1	19.537.000	100,00	95,83
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kerjasama dan disiplin pegawai	30	Orang	112.500.000	30	98.500.000	100,00	87,56
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	30	Orang	6.975.000	30	6.900.000	100,00	98,92
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja lingkup BPKAD yang terpenuhi kebutuhan administrasi umumnya	100	%	2.536.350.868	100	2.165.240.006	100,00	85,37
	Persentase rumusan kebijakan yang difasilitasi/ diusulkan sesuai Propemperda/ Propemperbup	100	%	160.704.000	100	105.985.000	100,00	65,95
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	262.391.013	1	253.090.208	100,00	96,46
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	963.876.383	6	950.648.978	100,00	98,63
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	Paket	193.933.522	8	164.886.445	100,00	85,02

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
		K	S	Rp.	K	Rp	K	Rp
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	248.800.950	2	241.963.584	100,00	97,25
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	160.704.000	1	105.985.000	100,00	65,95
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Laporan	112.375.000	4	110.200.000	100,00	98,06
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	754.974.000	12	444.450.791	100,00	58,87
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase unit kerja lingkup BPKAD yang terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarananya	100,00	%	6.248.290.093,00	97,14	5.901.883.000,00	97,14	94,46
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Roda 4 dan Roda 2)	36	Unit	3.663.647.568	36	3.255.461.500	100,00	88,86
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang Disediakan	7	Unit	913.440.867	7	891.924.207	100,00	97,64
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	266.794.050	5	253.500.000	100,00	95,02
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	627.503.979	5	603.406.700	100,00	96,16
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi	100,00	%	3.027.776.572	100	2.453.613.434	100,00	81,04

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
		K	S	Rp.	K	Rp	K	Rp
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	308.653.670	12	247.815.235	100,00	80,29
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	1.511.500.000	12	1.162.071.975	100,00	76,88
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.207.622.902	12	1.043.726.224	100,00	86,43
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana lingkup BPKAD dalam kondisi baik	100,00	%	2.099.209.940	100	1.818.364.247	100,00	86,62
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Kendaraan Roda 4)	17	Unit	156.090.000	17	99.650.554	100,00	63,84
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	147	Unit	610.250.000	147	448.508.600	100,00	73,50
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebeulair Yang Terpelihara	150	Unit	12.000.000	150	11.699.955	100,00	97,50
Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2	Unit	140.000.000	2	137.200.000	100,00	98,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	
		K	S	Rp.	K	Rp	K	Rp
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	823.146.840	5	806.881.347	100,00	98,02
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	61.703.100	1	59.500.000	100,00	96,43
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	296.020.000	6	254.923.791	100,00	86,12
Jumlah :				1.877.105.253.813,00		1.850.981.580.753,00		98,61

Pencapaian secara keseluruhan pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa program/kegiatan telah dilaksanakan dengan efisien, hal tersebut dapat dilihat dari anggaran Belanja dan capaian realisasi dengan Predikat Kinerja Sangat Tinggi sebesar 98.61%, dan capaian Fisik rata-rata 100.00%.

3.5 Analisis Efisiensi

3.5.1 Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis Akuntabilitas kinerja BPKAD Kabupaten Bogor tidak terlepas dari implementasi tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan dan Aset daerah yang meliputi pengelolaan keuangan, aset daerah mulai dari perencanaan, penatausahaan dan pelaporan.

Pencapaian Kinerja BPKAD Kabupaten Bogor pada tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja yang dilakukan sesuai program dan kegiatan yang bersifat ke dalam yakni mendukung tugas pokok dan fungsi, berupaya untuk selalu meningkatkan profesionalisme di bidang pengelolaan keuangan dan aset dengan melakukan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian serta perencanaan.
2. Capaian Kinerja program dan kegiatan yang bersifat keluar yaitu menjadi organisasi yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berorientasi pada hasil untuk pemenuhan kebutuhan Pemerintah kabupaten Bogor. Skala pengukuran ordinal rata-rata capaian indikator output adalah 100% dari target 100% masuk katagori "sangat berhasil".
3. Dengan hasil capaian kinerja tersebut output dari pekerjaan/kegiatan pelaksanaan sudah sesuai, baik secara fisik maupun keuangan.

Kinerja BPKAD kabupaten Bogor telah melampaui target melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk mempertahankan/meningkatkan kinerja keuangan dan aset daerah dengan cara meminimalkan permasalahan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan, sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknik, monitoring, pendampingan kepada Perangkat Daerah secara intensif dan berkelanjutan.

Akuntabilitas Keuangan Pertanggungjawaban baik yang berasal dari belanja tidak langsung maupun belanja langsung mulai dari perencanaan anggaran, penatausahaan sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.5.2 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi	100 %	98.91	1.09
2.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi	100 %	94.23	5.77

Dari dua Sasaran strategis, terdapat dua sasaran yang kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebagai berikut :

1. Sasaran Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas telah mencapai kinerja sebesar 100% dengan efisiensi anggaran 1.09%.

2. Sasaran

Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib telah mencapai kinerja sebesar 100% dengan efisiensi anggaran 2.83%

Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 2 sasaran tersebut, tingkat efisiensinya yaitu:

Dari tabel diatas dapat dianalisis efisiensi sebagai berikut :

- Efisiensi Belanja Pegawai pada Belanja Operasi berasal dari adanya efisiensi gaji dan tunjangan, dari tambahan penghasilan, akses untuk mengantisipasi adanya kenaikan pangkat, belum disalurkan iuran BPJS bagi sertifikasi guru.
- Efisiensi Belanja Pegawai pada Belanja Operasi berasal dari efisiensi pembayaran honorarium pengadaan barang/jasa karena disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- Efisiensi Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Operasi berasal dari efisiensi belanja bahan cetak, alat bahan komputer, belanja makanan minuman rapat/ jamuan, dan honorarium jasa narasumber/ tenaga ahli.
- Efisiensi Belanja Modal pada Belanja Modal berasal dari efisiensi belanja modal pengadaan peralatan komputer, belanja modal kendaraan dinas, belanja alat kantor dan rumah tangga, belanja tanda batas/ tugu, serta belanja BM Software (spek penyedia BM Software).

- Adapun beberapa sisa anggaran itu merupakan sisa hasil penawaran barang/jasa, sisa dari kegiatan yang telah selesai, serta penyesuaian pelaksanaan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Penyusunan LKIP dilakukan berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). BPKAD Kabupaten Bogor sesuai tujuan pencapaian kinerja terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel. Selaras dengan tugas dan fungsinya BPKAD yang mempunyai peran penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah di Kabupaten Bogor, yang berupaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disadari bahwa laporan ini masih perlu penyempurnaan dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Bogor serta pencapaiannya.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja BPKAD Kabupaten Bogor tahun 2025 menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah dicapai yaitu dari 2 Indikator kinerja sudah tercapai dan terpenuhi. Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain karena adanya komitmen pimpinan dan dukungan jajaran staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor tahun 2025 telah merealisasikan capaian target yang ditetapkan dalam Renstra BPKAD Tahun 2025-2029, dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Capaian kinerja sasaran strategis 1; Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi Realisasi 94.44% menunjukkan bahwa dari 72 SKPD, 68 SKPD telah mematuhi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, yang berarti hampir 95% dari SKPD yang ada berhasil memenuhi kriteria kepatuhan.

Capaian 100 % menunjukkan bahwa pencapaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yakni 100%.

Capaian kinerja sasaran strategis 2; Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi, Target tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah adalah 90.28%. Dari 72 SKPD, sebanyak 65 SKPD telah memenuhi kepatuhan, sehingga realisasi yang diperoleh adalah 90.28%. Dengan menggunakan rumus capaian, diperoleh nilai 100%, yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan yang dicapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Anggaran Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.877.105.253.813,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.816.373.781.704,00 atau sebesar 98,61% dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp 53.615.244.218,75 terealisasi sebesar Rp 46.677.791.463,00 atau terserap sebesar 87,06%.
2. Anggaran Belanja Modal sebesar Rp 4.514.849.172,25 terealisasi sebesar Rp 4.349.570.482,00 atau terserap sebesar 96,33%.
3. Anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 93.247.135.678,00 terealisasi sebesar Rp 83.480.481.684,00 atau terserap sebesar 89,52%.
4. Anggaran Belanja Transfer sebesar Rp 1.725.728.024.744,00 terealisasi sebesar Rp 1.681.865.938.075,00. atau terserap sebesar 99,46%.

4.2 Saran

Beberapa langkah yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja tahun 2025 dan pada tahun berikutnya, BPKAD Kabupaten Bogor perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Solusi terkait dengan Program Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :
 - Melakukan sosialisasi dan edukasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah;
 - Melakukan pembinaan dan pendampingan perencanaan anggaran kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan anggaran sesuai perencanaan, tepat waktu, efisiensi dan efektif;
 - Meningkatkan evaluasi dan optimalisasi pemanfaatan sistem pengelolaan keuangan daerah (aplikasi SIPD);
 - Melaksanakan evaluasi transaksi non-tunai untuk mendukung transparansi keuangan daerah;
 - Melakukan verifikasi dan review berkala dengan Perangkat daerah untuk Rekonsiliasi laporan SPJ Fungsional;
 - Dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah dilakukan rekonsiliasi secara berkala dengan Perangkat Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Tepat Waktu;

- b) Solusi terkait dengan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah :
 - Meningkatkan Koordinasi dan Pendampingan bagi Pengurus barang PD, dalam perencanaan kebutuhan BMD, dan peran Kepala PD selaku pengguna dalam pengelolaan BMD;
 - Penyampaian laporan pengadaan belanja modal dalam aplikasi ATISISBADA merupakan salah satu syarat dalam ajuan pencairan SP2D Perangkat Daerah;
 - Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pengurus Barang dalam melaksanakan penatausahaan barang milik daerah dengan tertib dan baik;
 - Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis, urusan penerbitan alas hak atas tanah-tanah yang belum memiliki Sertipikat dengan penyusunan SK penetapan atas Tanah digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor;
 - Meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan aset milik Pemerintah Kabupaten Bogor dengan kerjasama pihak ketiga (masyarakat) melalui sewa, pinjam, pakai serta kerja sama pemanfaatan aset (BOT) bangun guna serah.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat memberikan masukan yang berarti dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2026 yang akan datang.

LAMPIRAN

1. Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2024 beserta Tindak Lanjut Hasil Evaluasi.
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Murni dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
3. Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024
4. SOP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor
5. Dokumen pelaksanaan optimalisasi kegiatan Pengelolaan keuangan yang terkait dengan IKU "Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi" berupa:
 - 5.1 Rapat RENSTRA 2025-2029
 - 5.2 Rapat RENJA Perubahan 2025
 - 5.3 Kegiatan Penyusunan Perjanjian Kinerja 2025
 - 5.4 Koordinasi terkait Evaluasi SAKIP BPKAD 2025
 - 5.5 Rapat Evaluasi Kinerja TW I, II, III, dan IV Tahun 2025
 - 5.6 Dokumen pelaksanaan optimalisasi kegiatan Ketepatan Penetapan APBD terkait sosialisasi kebijakan dengan contoh evidence berupa "Laporan Hasil Sosialisasi Permendagri Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2026" dan Penghargaan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset pada SKPD tahun 2025
6. Dokumen pelaksanaan optimalisasi kegiatan Pengelolaan keuangan yang terkait dengan IKU "Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi" berupa:
 - 6.1 Pelaksanaan Kegiatan Bimtek BMD Tahun 2025
 - 6.2 Pelaksanaan Kegiatan Rekonsiliasi Data BMD 2025
 - 6.3 Reword dan punishment pada kegiatan Pemeringkatan melalui Aplikasi Siperjaka
7. Aplikasi Teknologi Informasi Surat Pencairan Elektronik Digital Yakin Enggal Salur (SPEED YES) sebagai INOVASI yang mendukung pencapaian Kinerja.

LINK EVIDENCE GOOGLE DRIVE

<https://drive.google.com/drive/folders/1IH3KuCCpBQkccvqwsPX8G7M4gPD4ycCn>